

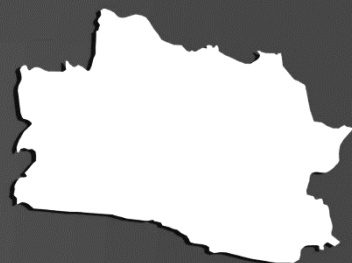
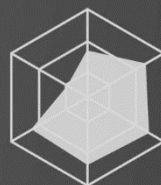
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

2017-2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGELUARAN

2017-2021



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

ISSN : 2655-0350

Nomor Publikasi : 32000.2211

Katalog : 9302020.32

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xviii + 134 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar Kover :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Ilustrasi Foto:

Koleksi Humas BPS Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

Tim Penyusun:

Pengarah	: Dyah Anugrah Kuswardani, MA
Koordinator Teknis	: Samiran, S.Si, MT
Naskah dan Pengolah Data	: Vira Wahyuningrum, SST, M.Stat Yuni Anggorowati, SST, MAP Marisa Intan, SP, MT, MPP Siswanita U., S.Si, MT Ir. Ninik Anisah, M.Sc
Editor	: Samiran, S.Si, MT Rendra Kurniawan, SST, MM Nani Komalasari, SE
Gambar Kover	: Singgah Satrio Prayogo, S.Kom
<i>Lay out</i> & Infografis	: Vira Wahyuningrum, SST, M.Stat

KATA PENGANTAR

PDRB merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini, penghitungan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sisi produksi (*production*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan *production* menjelaskan agregat PDRB yang terkait dengan penciptaan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha. Sedangkan pendekatan *expenditure* menjelaskan pengeluaran pendapatan baik untuk aktivitas konsumsi akhir dan investasi riil.

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2017-2021” ini menyajikan data dan informasi mengenai pendekatan dari sisi pengeluaran untuk periode tahun 2017–2021 atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dan sudah disesuaikan dengan *System of National Account* 2008 (SNA 2008) yang di rekomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga memberikan banyak manfaat bagi semua pengguna. Saran dan tanggapan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan dengan lebih baik pada edisi yang akan datang.

Bandung, April 2022
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat



Dyah Anugrah Kuswardani, MA

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	7
Bab II Metode Estimasi dan Sumber Data	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5 Perubahan Inventori	26
2.6 Ekspor Impor	30
Bab III Tinjauan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2017-2021	33
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran	37
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	46
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	57
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	62
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	68
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	75
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	80
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	83

	Hal
Bab IV Perkembangan Agregat PDDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	89
4.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran 2017-2021	92
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	95
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	98
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	99
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	101
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	104
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	106
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	108
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	110
Bab V Penutup	117
Lampiran	123

DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Miliar Rp)	38
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat 2017-2021 (Miliar Rp)	39
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	42
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	43
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	45
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	49
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	52
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	54
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	56
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	58
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	65
Tabel 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	67
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	71
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	76

	Hal.	
Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	82
Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	85
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	94
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2017-2021	96
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2017-2021	99
Tabel 20	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	100
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	102
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	105
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	106
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	109
Tabel 25	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	110
Tabel 26	<i>Incremental Capital Value Added Ratio</i> (ICVAR) Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	113

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Triliun Rp)	41
Gambar 2 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021	110

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.	
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Juta Rupiah)	125
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Juta Rupiah)	126
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	127
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	128
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	129
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	130
Tabel 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	131
Tabel 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	132
Tabel 9	Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021	133
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)	134

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemulihan kondisi ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat 3,74 persen, setelah sebelumnya terdampak pandemi *Covid-19* di tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar -2,44 persen. Jika dibandingkan dengan pola laju pertumbuhan ekonomi nasional, pemulihan di Jawa Barat lebih baik dengan laju pertumbuhan melebihi Nasional yang sebesar 3,69 persen. Sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan Jawa Barat selalu di atas nasional, namun di tahun 2020 perekonomian Jawa barat berkontraksi lebih dalam daripada nasional. Laju pertumbuhan Jawa Barat berkontraksi 2,44 persen sedangkan nasional berkontraksi 2,07 persen. Dalam kondisi normal secara rata-rata nasional, perekonomian Jawa Barat mempunyai kinerja yang lebih baik, terbukti dengan laju pemulihan yang lebih tinggi, meskipun saat terjadi pandemi Jawa Barat terdampak lebih berat.

Jika membandingkan dengan LPE nasional *year on year*, terlihat bahwa perekonomian Jawa Barat sampai dengan triwulan III tahun 2019 selalu tumbuh di atas nasional. Mulai triwulan IV tahun 2019 LPE Jawa Barat lebih lambat daripada laju nasional, dan terus berlanjut pada laju pertumbuhan *year on year* pada tahun 2020 hingga perekonomian Jawa Barat berkontraksi lebih dalam daripada nasional. Penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih berlangsung sampai dengan triwulan I 2021, dengan penurunan sebesar -0,80 persen secara *year on year*, lebih dalam daripada nasional yang sebesar -0,70 persen. Triwulan berikutnya laju pertumbuhan meningkat signifikan mencapai 6,20 persen, tetapi masih di bawah laju pertumbuhan nasional yang sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan positif terus berlanjut meskipun terjadi perlambatan di triwulan III, dan posisi Jawa Barat sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,51 persen. Pada triwulan IV 2021, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat meningkat signifikan mencapai 6,21 persen, lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 5,02 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya pemulihan perekonomian Jawa Barat secara bertahap, walaupun berkontraksi lebih dalam tetapi mampu bangkit lebih tinggi.

Kondisi perbaikan ini ditandai dengan konsumsi yang berangsur pulih, belanja publik terkait bantuan sosial meningkat signifikan, ekspor juga

berangsur pulih, serta nilai tukar rupiah yang membaik. Walaupun belum bisa mencapai nilai di tahun 2019, pemulihan sudah mulai tampak di tahun 2021. Peningkatan laju pertumbuhan positif terlihat pada triwulan II 2021 yang terjadi pada hampir seluruh komponen. Indikasi penguatan permintaan akhir telah nampak terlihat nyata meskipun masih terjadi perlambatan, namun setidaknya kondisinya tidak semakin parah.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,33 persen. Nilai konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maka akan semakin besar pula nilai konsumsinya. Demikian pula sebaliknya, ketika pendapatan berkurang akibat pengurangan jam kerja atau pemutusan hubungan kerja atau karena tidak lagi bekerja maka pendapatan akan menurun bahkan menjadi tidak ada, sehingga mempengaruhi nilai konsumsi rumah tangga. Ketika kondisi perekonomian mulai membaik, akan seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat yang kemudian meningkatkan daya beli.

Indikator perbaikan pemulihan ekonomi terlihat pada kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan yang semakin membaik. Pada tahun 2020 (Agustus), kondisi pandemi menyebabkan jumlah angkatan kerja yang terdampak sebanyak 6,36 juta orang, dan pada tahun 2021 (Agustus) menurun sebanyak 1,73 juta orang, menjadi 4,63 juta orang. Angkatan kerja yang terdampak pandemi terdiri dari pengangguran karena *Covid*, bukan angkatan kerja karena *Covid*, sementara tidak bekerja karena *Covid*, dan bekerja karena pengurangan jam kerja karena *Covid*. Jumlah pengangguran secara umum menurun sebanyak 0,10 juta orang atau sekitar 100 ribu orang (Agustus 2020-Agustus 2021), serta setengah penganggur berkurang 0,28 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka 0,64 persen dari 10,46 persen menjadi 9,82 persen (Agustus 2020-Agustus 2021). Di sisi lain, tingkat kemiskinan turun 0,46 poin menjadi 7,97 persen (September 2020– September 2021).

Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,92 persen setelah sebelumnya terkonstraksi sebesar -4,08 persen. Sebagaimana diketahui, sumber utama pendanaan lembaga ini adalah rumah tangga, lembaga nonpemerintah dan pengusaha, sehingga dalam masa pandemi tentu saja turut terdampak bahkan terkontraksi lebih dalam daripada laju konsumsi rumah tangga. Pelonggaran pemberlakuan aturan pembatasan kegiatan masyarakat secara menyeluruh

hingga secara proporsional memberi pengaruh pula pada meningkatnya aktivitas LNPRT.

Belanja pemerintah di tahun 2021 difokuskan pada penanganan dampak *Covid-19* dan pemulihan ekonomi, secara total meningkat 1,95 persen setelah sebelumnya di tahun 2020 menurun 0,48 persen. Meskipun secara total meningkat, belanja kolektif pemerintah masih mengalami penurunan sebesar 5,87 persen. *Refocusing* anggaran masih terjadi terutama untuk biaya yang terkait operasional kedinasan seperti pembayaran honor, pertemuan, rapat serta perjalanan dinas juga masih dibatasi. Penurunan konsumsi pemerintah fungsi kolektif, yaitu berupa pengurangan belanja pegawai. Kebijakan pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) masih berlaku sama dengan tahun 2020, tak hanya PNS dan TNI/POLRI yang menerima THR di tahun 2020 tetapi juga pensiunan.

Pada tahun 2021 langkah penting dalam pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional melalui empat tahap. Pertama, menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional dengan cara peningkatan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial. Peningkatan tersebut akan digunakan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi beras, subsidi tagihan dan abonemen listrik, serta kuota belajar. Kedua, menambah anggaran Kartu Pekerja, tercatat bahwa kartu pekerja sangat efektif dalam membantu pencari kerja dan pekerja yang terkena PHK karena pandemi. Ketiga, mengambil alih transfer ke daerah, hal tersebut dilakukan karena progress penyaluran bantuan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berjalan lambat. Keempat, membantu UMKM, penambahan anggaran untuk diterimakan kepada tiga juta peserta baru se-Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan konsumsi pemerintah secara total meningkat sebesar 1,95 persen. Namun pada konsumsi pemerintah fungsi kolektif terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -5,87 persen. Sebaliknya konsumsi pemerintah fungsi individu meningkat signifikan sebesar 13,55 persen. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan pandemi *Covid-19*.

Pada tahun 2021 aktivitas investasi regional Jawa Barat meningkat 6,99 persen, setelah pada tahun sebelumnya terkontraksi 8,34 persen. Sejalan dengan data Realisasi PMA/PMDN Jawa Barat dengan pertumbuhan positif. Realisasi PMA dan PMDN Jawa Barat di tahun 2021 adalah sebesar 136,13 triliun rupiah, meningkat sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 120,43 triliun rupiah. PMTB terdiri dari dua jenis yaitu bangunan dan

nonbangunan, aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2021 mulai meningkat pada kinerja PMTB Bangunan yang meningkat sebesar 6,47 persen. Aktivitas pembelian barang modal tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 9,22 persen.

Kinerja perekonomian Jawa Barat pada tahun 2021 telah mulai membaik, namun laju pertumbuhan perubahan inventori di dalam PDRB Jawa Barat pun kembali terkoreksi signifikan, yakni 152,2 persen. Bahkan nilainya pada tahun ini negatif, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sebelumnya di tahun 2020 perubahan inventori telah terkonstraksi sebesar 62,85 persen, akan tetapi nilainya masih positif.

Di tahun 2021, komponen perdagangan luar negeri dan luar wilayah meningkat signifikan. Realisasi nilai ekspor luar negeri Jawa Barat tahun 2021 mencapai 33,86 Miliar USD naik sebesar 27,34 persen dibanding nilai ekspor tahun 2020. Sementara realisasi nilai impor luar negeri Jawa Barat tahun 2021 mencapai 11,99 Miliar USD naik sebesar 37,93 persen dibanding nilai impor tahun 2020. Pandemi *Covid-19* juga berpengaruh terhadap permintaan ekspor global sehingga kinerja ekspor terkontraksi sebesar 6,55 persen pada tahun 2020. Jawa barat merupakan provinsi dengan tumpuan perekonomian industri pengolahan dan peranan investasi asing terbesar di Indonesia, sehingga perekonomian Jawa Barat sangat terpengaruh oleh kondisi perekonomian global. Industri besar di Jawa Barat sebagian besar berorientasi ekspor, dan mengandalkan bahan baku serta barang modal impor. Kinerja komponen impor barang dan jasa mengalami kontraksi pada tahun 2020 sejalan dengan penurunan kinerja industri pengolahan. Besaran kontraksi impor cukup dalam yaitu 16,85 persen pada tahun tersebut. Besarnya peranan impor yang tinggi di satu sisi, bagi Jawa Barat menggerakkan aktivitas ekonomi di sisi *supply* karena mayoritas menggunakan bahan baku impor, tetapi di sisi lain menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap produk luar wilayah Jawa Barat. Kebijakan pemerintah untuk aktivitas impor harus diarahkan untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan bahan baku impor agar tidak menjadi pengurang bagi daya saing perekonomian wilayah.

Upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah sudah mulai terlihat hasilnya, dengan tumbuhnya pinjaman modal investasi di akhir periode tahun 2021 mengindikasikan adanya optimisme dalam pemulihan ekonomi. Semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksin, memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi. Target pemerintah

pada tahun 2021 memastikan ketersediaan vaksin yang cukup sebagai prioritas utama, selanjutnya dilakukan vaksinasi *booster* secara bertahap di tahun 2021 dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pemulihan ekonomi yang aman dan cepat perlu dukungan berbagai pihak.

<https://jabar.bps.go.id>

The background features several large, stylized green leaves with a gradient from light to dark green, arranged in a fan-like pattern. A white circle is positioned in the center, containing the text 'BAB I'.

**BAB
I**

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran moneter nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan pada periode waktu tertentu. PDRB nominal bisa menggambarkan ekonomi suatu wilayah dan bisa dibandingkan secara nasional di pasar internasional. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan PDB/PDRB sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai kotor yang ditambahkan dari semua unit penduduk dan institusi yang terlibat dalam produksi dan jasa (ditambah pajak dikurangi subsidi). Dengan demikian PDB/PDRB adalah alat untuk mengukur nilai moneter akhir barang dan jasa yang dibeli oleh pengguna akhir dan diproduksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan SNA 2008, pengertian PDB/PDRB merupakan konsep nilai tambah yang diperoleh dari selisih antara output dengan konsumsi antara yaitu jumlah nilai tambah bruto seluruh unit produsen residen ditambah pajak atas produk kurang subsidi atas produk yang tidak termasuk di dalam penilaian output. Di sisi lain, konsep PDB/PDRB merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi nilai impor barang dan jasa. Dengan demikian PDB/PDRB

merupakan jumlah pendapatan primer yang didistribusikan oleh unit produsen residen.

Produk Domestik Neto (PDN/PDRN) diperoleh dengan mengurangi PDB/PDRB dengan konsumsi barang modal tetap. Namun ukuran bruto (*gross*) dari produk dan pendapatan akan digunakan dengan berbagai alasan. Penyusutan aset tetap seperti yang dihitung pada akuntansi bisnis, secara umum tidak memenuhi syarat SNA. Penghitungan konsumsi barang modal tetap membutuhkan statistik dalam mengestimasi nilai stok aset tetap, usia berbagai jenis aset, pola penyusutan dan lain-lain. Tidak seluruh negara/wilayah menyusun penghitungan seperti itu, dan bila mereka melakukan mungkin berbeda metodologi (dengan menggunakan data bisnis meskipun kurang tepat). Akibatnya nilai bruto lebih sering muncul atau tersedia lebih dulu, dan secara umum lebih dapat diperbandingkan antar negara. Sehingga PDB/PDRB secara luas digunakan, meskipun menurut konsep dasar ekonomi manfaatnya lebih rendah dari PDN/PDRN. PDN/PDRN juga harus dihitung dengan mengembangkan estimasi konsumsi barang modal tetap agar dapat menjadi alat yang bermakna dalam berbagai jenis analisis.

Pendapatan primer yang tercipta dari aktivitas produksi oleh unit produsen residen, sebagian besar didistribusikan ke unit institusi residen lainnya; sedangkan sebagian lagi dapat didistribusikan ke unit nonresiden. Demikian halnya beberapa pendapatan primer yang tercipta di luar negeri, mungkin berasal dari unit residen. Hal itu mengarah pada pendefinisian dan pengukuran Pendapatan Nasional/Regional Bruto (PNB/PRB). PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pendapatan primer yang dibayar ke unit nonresiden, ditambah dengan pendapatan primer yang diterima dari unit nonresiden. Dengan kata lain, PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pajak

(kurang subsidi) atas produksi dan impor, kompensasi tenaga kerja, serta pendapatan kepemilikan yang dibayarkan ke luar negeri; ditambah pendapatan kepemilikan yang diterima dari luar negeri. Dengan demikian, PNB adalah jumlah pendapatan primer bruto yang diterima oleh unit institusi residen atau sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui pendapatan regional. Pendapatan regional adalah Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh residen yang tinggal di suatu daerah pada periode tertentu (www.bps.go.id). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta perubahan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit

produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergudangan, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15) Jasa Pendidikan, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri atas: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun, dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan data PDRB. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri serta luar wilayah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://jabar.bps.go.id>



*BAB
II*

*METODE ESTIMASI
DAN SUMBER DATA*

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi adalah:

- Makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

- Bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- Barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- Jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dan sejenisnya), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh nonresiden diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan
- Jumlah penduduk pertengahan tahun
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Namun, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan

pengurus;

- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, Organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PK-LNPRT tahunan adalah sebagai berikut:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SK-LNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADH berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-deflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen,

pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

Komponen pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

- PK-Pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi;
- PK-Pemerintah provinsi yang bersangkutan;
- PK-Pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi;
- PK-Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P provinsi tahunan adalah:

- Data realisasi APBN tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD tahunan (Kemenkeu)
- Statistik keuangan daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta indeks harga dari BPS.

Secara umum, PK-P ADH berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADH Berlaku} = \text{Output nonpasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **nonpasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam

bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P provinsi ADH berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara umum, barang modal dapat diklasifikasikan menurut 4 (empat) golongan, yaitu : menurut jenis barang modal, lapangan usaha, institusi, dan wilayah asal. Dalam kerangka penyusunan PDRB, PMTB dirinci menurut jenis barang modal, yaitu:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya

(*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PMTB tahunan antara lain:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

❖ Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH konstan, maka PMTB ADH berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

❖ Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH berlaku maupun ADH konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADH konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH berlaku, nilai PMTB ADH konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADH berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADH konstan adalah dengan cara men *deflate* PMTB ADH berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH konstannya diperoleh dengan men-deflate nilai ADH berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADH konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH

konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini

adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Pada prinsipnya, inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi sebagai input antara atau untuk dijual tanpa mengalami proses lebih lanjut. Klasifikasi inventori dalam keperluan penghitungan

perubahan inventori dapat dibedakan atas:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

❖ Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

- Menghitung posisi inventori ADH konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADH konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya;
- Menghitung perubahan inventori ADH berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADH konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

❖ Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah.

Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net ekspor antar daerah yang terdiri dari ekspor antar daerah dan impor antar daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Ekspor-impor tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)

- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun nonresiden. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



*BAB
III*

*TINJAUAN PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2017 - 2021*

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017 – 2021

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan optimalisasi tujuh potensi pengembangan ekonomi baru dalam rangka pemulihan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*. Optimalisasi yang *pertama* adalah menangkap potensi relokasi industri dari Cina ke negara-negara ASEAN. *Kedua*, ekonomi swasembada yang pada akhirnya berhubungan dengan ketahanan pangan dengan meluncurkan Program Petani Milenial. Potensi *ketiga* ialah Jawa Barat akan menjadi pusat perawatan kesehatan yang unggul. *Keempat* ialah ekonomi 4.0 *manufacturing* yakni meningkatkan daya saing industri manufaktur dengan basis teknologi termutakhir. *Kelima* adalah pemanfaatan *digital innovation* karena saat ini hampir semua aspek kehidupan sudah disentuh oleh inovasi digital baik secara personal, bisnis, edukasi, termasuk pertemuan atau rapat. *Keenam* adalah mengembangkan keberlangsungan bisnis hijau. *Ketujuh* mengembangkan potensi pariwisata daerah.

Optimisme yang diciptakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan semangat dan harapan agar pemulihan ekonomi berjalan cepat dan aman. Perlambatan pertumbuhan ekonomi telah terasa di tahun 2020, akibat perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kedua negara tersebut adalah mitra dagang utama Jawa Barat. Merebaknya wabah *Covid-19* berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia terutama Jawa Barat. Bagi Jawa Barat, Amerika Serikat merupakan negara

tujuan ekspor nonmigas terbesar sedangkan Tiongkok adalah negara asal impor nonmigas terbesar. Oleh karena itu, kondisi ketegangan dan keterpurukan ekonomi di kedua negara tersebut sangat berpengaruh bagi perekonomian Jawa Barat.

Meskipun pandemi *Covid-19* masih berlangsung hingga tahun 2021, namun mulai menggeliatnya perekonomian menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dimulai pada triwulan II 2021, dengan kenaikan yang cukup signifikan mencapai 6,20 persen secara *year on year*. Triwulan berikutnya laju pertumbuhan masih mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar triwulan sebelumnya yaitu menjadi 3,51 persen secara *year on year*. Selanjutnya pada triwulan IV 2021 pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara *year on year* sebesar 6,21 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya pemulihan perekonomian Jawa Barat secara bertahap.

Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2017-2019 mengalami kecenderungan membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,33 persen dan mengalami akselerasi pada tahun 2018, yaitu sebesar 5,65 persen. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan menjadi 5,02 persen. Jika dibandingkan dengan pola laju pertumbuhan ekonomi nasional, tahun 2017 dan 2018 laju pertumbuhan Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan nasional dan tahun 2019 sama dengan nasional yaitu sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2020 perekonomian Jawa Barat berkontraksi lebih dalam daripada nasional. Laju pertumbuhan Jawa Barat tahun 2020 berkontraksi hingga -2,52 persen sedangkan nasional berkontraksi -2,07 persen. Sementara pada tahun 2021, laju pertumbuhan Jawa Barat sebesar 3,74 persen, masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 3,69 persen. Dalam kondisi

normal secara rata-rata nasional, perekonomian Jawa Barat mempunyai kinerja yang lebih baik namun saat terjadi pandemi Jawa Barat terdampak lebih berat. Dampak yang besar akibat pandemi ini juga sangat mempengaruhi upaya pemulihan dan perbaikan ekonomi di Jawa Barat.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Peran pemerintah dalam penyelamatan dan pemulihan ekonomi sangat besar. Intervensi pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi antara lain pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi. Ketiga variabel tersebut merupakan permintaan domestik, sedangkan ekspor adalah permintaan eksternal. Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Tinjauan dari sisi penawaran dijabarkan pada PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan dari sisi permintaan dijabarkan oleh PDRB menurut pengeluaran. Pertumbuhan keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah. PDRB menurut lapangan usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Lebih spesifik PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah tangga (LNPRM) serta Pemerintah. Konsumsi yang

dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB menurut pengeluaran. Investasi dalam hal ini PMTB yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, LNPRT, pemerintah, korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara.

Tabel 1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2017–2021 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.169.367,39	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08
2. Konsumsi LNPRT	10.450,02	12.753,65	13.629,89	13.340,95	13.760,94
3. Konsumsi Pemerintah	107.939,50	112.935,06	117.448,94	118.688,96	123.705,13
4. PMTB	449.337,05	495.827,14	531.364,62	489.180,23	547.931,94
5. Perubahan Inventori	67.740,46	72.019,60	73.290,76	27.303,94	-15.096,31
6. Ekspor	732.231,39	859.971,31	943.711,91	915.058,23	1.120.383,27
7. Dikurangi Impor	748.948,45	871.157,99	944.054,68	857.856,45	1.005.456,66
Total PDRB	1.788.117,36	1.960.627,65	2.123.153,71	2.084.620,25	2.209.822,38

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Konsumsi akhir oleh rumah tangga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan tarikan permintaan dalam perekonomian. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan perubahan inventori, menggambarkan bagaimana kekuatan perekonomian Jawa Barat berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk

domestik juga diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor. Nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Tabel 2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2017–2021 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	836.915,02	878.991,27	920.742,90	894.114,73	905.974,62
2. Konsumsi LNPRT	7.844,28	9.032,68	9.353,99	8.971,94	9.144,60
3. Konsumsi Pemerintah	68.619,75	69.973,15	72.248,44	71.902,49	73.303,61
4. PMTB	332.750,61	352.312,42	366.760,22	336.213,72	359.705,21
5. Perubahan Inventori	42.629,35	43.588,21	43.599,93	16.198,45	-8.456,84
6. Ekspor	493.916,58	550.805,25	591.685,34	552.911,91	679.718,66
7. Dikurangi Impor	439.013,45	485.078,85	513.431,14	426.932,53	511.643,47
Total PDRB	1.343.662,14	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Nilai PDRB Jawa Barat (ADH berlaku) selama periode tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar nasional dan internasional. Namun, pada tahun 2020 nilai

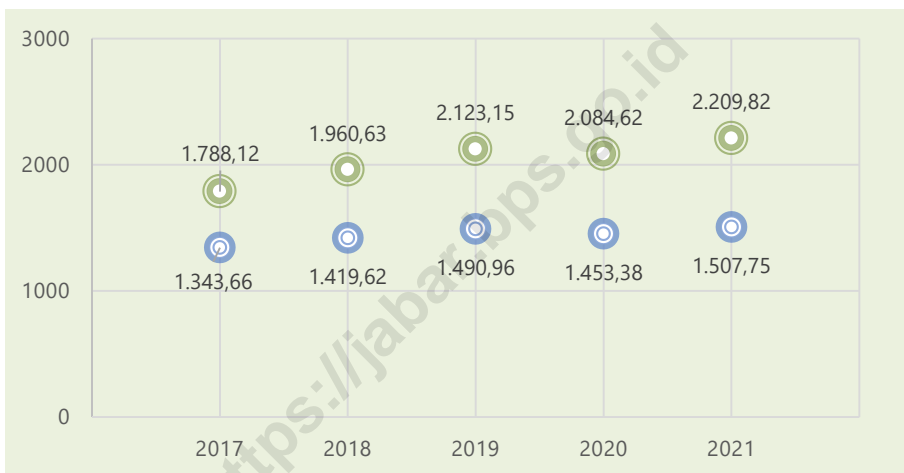
PDRB Jawa Barat atas dasar berlaku berkurang sebesar 38.533,47 miliar rupiah. Seluruh komponen mengalami penurunan nilai, hanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang bertambah secara total sebesar 1.240,01 miliar rupiah. Pada tahun 2021, nilai PDRB atas dasar berlaku menunjukkan peningkatan 125.202,14 miliar rupiah atau sebesar 6,01 persen dari nilai PDRB berlaku tahun 2020. Seluruh komponen PDRB pengeluaran, kecuali perubahan inventori, mengalami peningkatan nilai secara berlaku di tahun 2021.

Selain dinilai atas dasar harga (ADH) berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH konstan 2010 atau ADH berbagai produk dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADH konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2017–2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB ADH Konstan dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya dengan PDRB ADH berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADH konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 2017-2019, kemudian menurun pada tahun 2020. Akibat pandemi, nilai PDRB ADH konstan pada tahun 2020 mengalami pengurangan yang cukup berarti. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, tahun 2021 PDRB ADH konstan menunjukkan kenaikan 54.365,67 miliar rupiah secara total, peningkatan nilai terjadi di seluruh komponen

kecuali komponen perubahan inventori. Kenaikan terbesar terjadi pada komponen ekspor yaitu 126.806,75 miliar rupiah, demikian pula nilai komponen impor juga mengalami kenaikan sebesar 84.710,95 miliar rupiah. Pada tahun 2021 ini transaksi perdagangan luar wilayah mengalami surplus sebesar 168.075,19 miliar rupiah.

Gambar 1.
Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017–2021 (Triliun Rp)



Dari gambar di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADH berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB ADH konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADH berlaku. Dalam PDRB ADH konstan pengaruh faktor harga telah diabaikan. Sehingga selisih nilai antara ADH berlaku dengan ADH konstan merupakan nilai perubahan harga. PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), PMTB, perubahan inventori, serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa tahun 2021 terdapat tiga komponen yang mengalami peningkatan peranan. Komponen PMTB mengalami peningkatan peranan menjadi 24,80 persen atau naik sebesar 1,33 poin. Beberapa proyek-proyek pembangunan yang sempat terhenti di tahun 2020 akibat pandemi, mulai dilanjutkan kembali dan diselesaikan pada tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada peranan ekspor yang naik cukup signifikan sebesar 6,80 poin menjadi 50,70 persen dan peranan impor juga mengalami kenaikan sebesar 4,35 poin menjadi 45,50 persen.

Tabel 3.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,40	65,20	65,36	66,15	64,47
2. Konsumsi LNPRT	0,58	0,65	0,64	0,64	0,62
3. Konsumsi Pemerintah	6,04	5,76	5,53	5,69	5,60
4. PMTB	25,13	25,29	25,03	23,47	24,80
5. Perubahan Inventori	3,79	3,67	3,45	1,31	-0,68
6. Ekspor	40,95	43,86	44,45	43,90	50,70
7. Dikurangi Impor	41,88	44,43	44,46	41,15	45,50
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Peranan konsumsi rumah tangga lebih besar jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Pada tahun 2021 peranan konsumsi rumah tangga mencapai 64,47 persen, mengalami penurunan 1,68 poin dari tahun 2020. Konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan peranan namun tidak terlalu signifikan menjadi 5,60 persen. Di masa pandemi pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk menangani dampak yang lebih berat dan kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan peran pemerintah

cukup kuat dalam upaya meredam dampak pandemi yang lebih buruk dan berupaya memulihkan perekonomian. Komponen perubahan inventori mengalami penurunan terbesar yaitu 1,99 poin menjadi -0,68 persen dari sebelumnya yang sebesar 1,31 persen.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 secara rata-rata di atas 5 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,33 persen pada tahun 2017 dan 5,65 persen pada tahun 2018 serta melambat pada 2019 menjadi 5,02 persen. Kondisi perlambatan ini berlanjut menjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar -2,52 persen dengan merebaknya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. Memasuki tahun kedua pandemi, di tahun 2021 secara perlahan perekonomian mulai pulih yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan positif sebesar 3,74 persen.

Tabel 4.
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,61	5,03	4,75	-2,89	1,33
2. Konsumsi LNPRT	4,77	15,15	3,56	-4,08	1,92
3. Konsumsi Pemerintah	3,82	1,97	3,25	-0,48	1,95
4. PMTB	6,28	5,88	4,10	-8,33	6,99
5. Perubahan Inventori	-4,42	2,25	0,03	-62,85	-152,21
6. Ekspor	13,40	11,52	7,42	-6,55	22,93
7. Impor	12,22	10,49	5,84	-16,85	19,84
Total PDRB	5,33	5,65	5,02	-2,52	3,74

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tanda perbaikan ekonomi yang terjadi di 2021 terlihat pada pertumbuhan positif di semua komponen pengeluaran, kecuali perubahan inventori. Total ekspor pada tahun 2021 tumbuh dari -6,55 persen pada tahun 2020 menjadi 22,93 persen. Demikian halnya dengan impor total, laju pertumbuhannya pada tahun 2021 sebesar 19,84 persen tumbuh dari tahun sebelumnya yang sebesar -16,85 persen. Kenaikan ekspor yang signifikan menyebabkan pertumbuhan positif pada net ekspor sebesar 33,41 persen. Sementara itu, komponen PMTB tumbuh sebesar 6,99 persen, di mana pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -8,33 persen.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 1,33 persen dibandingkan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -2,89 persen. Hal ini mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi dan konsumsi masyarakat Jawa Barat meskipun belum sepenuhnya pulih. Bantuan sosial pemerintah dari berbagai sumber bantuan cukup baik meredam dampak pandemi yang lebih parah. Terjadinya pandemi di awal tahun 2020 menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat berubah. Seiring kesadaran masyarakat yang semakin baik, serta upaya nyata pemerintah dalam kebijakan penyelamatan dan pemulihan ekonomi, terjadi pergeseran konsumsi masyarakat ke komoditi yang mendukung kegiatan di masa pandemi. Pergeseran konsumsi tersebut antara lain peningkatan kebutuhan informasi, komunikasi dan peralatannya serta konsumsi transportasi dan kendaraan yang menurun.

Penurunan laju pertumbuhan tahun 2021 terjadi pada komponen perubahan inventori, yaitu sebesar -152,21 persen. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak dalam skala masif dan global, sehingga memaksa pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan cepat. Di tengah kondisi yang

tidak pasti, pelaku ekonomi akan melakukan tindakan keamanan untuk menyelamatkan usahanya, salah satunya adalah dengan memperkecil inventori/stok untuk menghindari keluarnya biaya yang lebih besar.

Tabel 5.
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2017–2021 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	139,72	145,43	150,72	154,22	157,24
2. Konsumsi LNPRT	133,22	141,19	145,71	148,70	150,48
3. Konsumsi Pemerintah	157,30	161,40	162,56	165,07	168,76
4. PMTB	135,04	140,74	144,88	145,50	152,33
5. Perubahan Inventori	158,91	165,23	168,10	168,56	178,51
6. Ekspor	148,25	156,13	159,50	165,50	164,83
7. Impor	170,60	179,59	183,87	200,93	196,52
Total PDRB	133,08	138,11	142,40	143,43	146,56

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit (indeks perkembangan) PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Sedangkan perubahan indeks implisit secara total merupakan perubahan secara umum atau menurut berbagai kegiatan ekonomi. Indeks implisit atau dikenal sebagai deflator PDRB menunjukkan pengaruh perubahan harga pada PDRB, pertama dengan menetapkan tahun dasar dan, kedua, dengan membandingkan harga saat ini dengan harga di tahun dasar. Deflator harga PDRB menunjukkan seberapa besar perubahan PDRB bergantung pada perubahan tingkat harga. Ini mengungkapkan sejauh

mana perubahan tingkat harga, atau inflasi, dalam perekonomian dengan melacak harga yang dibayarkan oleh sektor usaha, pemerintah, dan konsumen. Tabel 5 menyajikan indeks implisit PDRB tahun 2017-2021 dirinci menurut komponen pengeluaran.

Indeks implisit pada konsumsi rumah tangga berbeda dengan besaran Indeks Harga Konsumen (IHK). Perbedaan ini karena cakupan komoditas di wilayah di mana indeks implisit mencakup semua komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan, sedangkan IHK hanya mencakup sebagian komoditas dan rumah tangga di wilayah perkotaan saja.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di wilayah provinsi Jawa Barat adalah untuk konsumsi akhir rumah tangga. Oleh karena itu analisis mengenai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dalam ekonomi makro merupakan hal yang sangat penting. Dalam masa pandemi, rumah tangga terdampak paling besar, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar menerima dampak yang cukup besar. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maka akan semakin besar pula nilai konsumsinya. Demikian pula sebaliknya saat kondisi kegiatan ekonomi terkendala bahkan terhenti maka akan terjadi pengurangan jam kerja bahkan penghentian hubungan kerja. Hal ini tentu saja langsung berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi memperoleh pendapatannya dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya, sehingga saat kondisi perekonomian menurun maka pendapatan juga akan menurun. Permintaan akhir secara keseluruhan juga

dapat memberikan dampak tarikan terhadap aktivitas ekonomi, turunnya permintaan terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh penurunan produksi. Menurunnya perdagangan luar negeri juga mempengaruhi menurunnya permintaan ekspor. Jawa Barat sebagai wilayah dengan industri yang berorientasi ekspor cukup berat terdampak pandemi. Kondisi ini tak pelak berakibat pada pemutusan hubungan kerja terhadap buruh, dan sector ekonomi pendukung lainnya, seperti usaha-usaha informal yang biasanya muncul di sekitar kawasan sentra industri besar. Buruh dan keluarga yang tidak mungkin bertahan memilih Kembali ke kampung halaman. Sebagaimana diketahui, Jawa Barat merupakan daerah tujuan buruh migran dari berbagai provinsi di Indonesia. Selama masa pandemi sentra industri mengalami pengurangan jumlah penduduk, bergeser ke wilayah kabupaten/kota sekitar atau ke luar Jawa Barat.

Selama kurun waktu 2017-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan) sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga, hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 6. Di masa sebelum pandemi, kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan kelas menengah (*middle class*) menyebabkan terjadinya perbaikan serta merubah perilaku dan kebiasaan konsumsi penduduk secara agregat.

Pada tahun 2020 nilai konsumsi rumah tangga mengalami penurunan terkait dampak pandemi, hal tersebut disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat serta terjadinya penurunan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Provinsi Jawa Barat merupakan

wilayah tujuan migrasi bagi penduduk sekitar wilayah Jawa Barat, banyaknya jumlah perusahaan industri besar sedang merupakan daya tarik khusus bagi para pencari kerja. Di masa pandemi, banyak perusahaan yang menghentikan kegiatan produksi bahkan beberapa melakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu penduduk atau pekerja migran yang berasal dari luar wilayah Jawa Barat kembali ke daerah asalnya. Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 memberikan gambaran bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 1,16 juta orang atau 2,35 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengindikasikan konsumsi rumah tangga tidak hanya menurun secara kuantitas tapi juga kualitas.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun menurut ADH berlaku selama periode 2017-2019, tetapi pada tahun 2020 nilainya menurun dan mulai kembali meningkat di tahun 2021 dan telah melebihi nilai di tahun 2019. Sedangkan gambaran konsumsi per rumah tangga ADH konstan 2010 mempunyai pola yang sama dengan ADH berlaku, hanya saja secara nilai di tahun 2021 belum mencapai nilai di tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan adanya tingkat perubahan harga atau inflasi yang terjadi di tahun 2021. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 sampai dengan 2020 rata-rata di atas 65 persen dan semakin tinggi perannya pada tahun 2020 menjadi 66,04 persen, namun pada tahun 2021 peranannya menurun menjadi 64,47 persen.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangganya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Selama periode

2017 sampai dengan 2021, pengeluaran ADH berlaku terus meningkat dari 91,63 juta rupiah (2017); tahun 2018 sebesar 98,87 juta rupiah; tahun 2019 sebesar 106,14 juta rupiah; tahun 2020 sebesar 107,85 juta rupiah; dan pada tahun 2021 sebesar 109,99 juta rupiah. Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi nonmakanan. Secara ADH berlaku peningkatan konsumsi per rumah tangga yang terjadi di tahun 2020 merupakan dampak dari terjadinya inflasi dan menurunnya jumlah rumah tangga yang sebesar 2,2 persen.

Tabel 6.
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.169.367,39	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	836.915,02	878.991,27	920.742,90	894.114,73	905.974,62
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	65,40	65,14	65,36	66,15	64,47
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	91.634,80	98.867,17	106.136,73	107.848,72	109.997,33
b. ADHK 2010	65.582,93	67.984,68	70.418,86	69.931,70	69.953,11
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	24.342,75	26.256,81	28.139,80	28.633,98	29.203,03
b. ADHK 2010	17.422,08	18.055,15	18.670,00	18.566,96	18.571,75
Pertumbuhan (<i>persen</i>)					
a. Total Konsumsi RT	4,61	5,03	4,75	-2,89	1,33
b. per-RT	3,21	3,66	3,58	-0,69	0,03
c. per kapita	3,18	3,63	3,41	-0,55	0,03
Jumlah RT (<i>unit</i>)	12.761.171	12.929.256	13.075.231	12.785.542	12.951.170
Jumlah penduduk (<i>000 orang</i>)	48.037,60	48.683,70	49.316,71	48.156,23	48.782,40

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Dampak penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi tergambar pada pola pertumbuhan ADH konstan, yang memperlihatkan pergerakan secara kuantitatif tanpa adanya pengaruh inflasi. Dampak pandemi menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan bagi masyarakat dengan lapangan pekerjaan informal, bahkan sebagian pekerja formal pun juga mengalaminya. Pembatasan pergerakan manusia melumpuhkan kegiatan ekonomi yang mengandalkan interaksi kontak langsung, seperti halnya industri, perdagangan, restoran, transportasi, konstruksi, dan perhotelan. Sedangkan kegiatan ekonomi dengan intensitas kontak lebih sedikit masih mampu bertahan. Kegiatan yang tergantung kepada permintaan luar negeri maupun yang mengandalkan impor bahan baku dan barang modal dari luar negeri juga mengalami dampak yang cukup berat, seperti industri modal asing. Tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor yang rentan tersebut mengalami pengurangan jam kerja bahkan kehilangan pekerjaan dan tentunya hal tersebut berdampak langsung kepada pendapatan. Sebagian memilih untuk kembali ke daerah asalnya di luar Jawa Barat, terutama pekerja dengan produktivitas rendah. Laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga pada kisaran 3 persen sampai dengan tahun 2019, namun di tahun 2020 menurun menjadi -0,69 persen, dan pada tahun 2021 sedikit meningkat yaitu 0,03 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik ADH Berlaku maupun ADH Konstan 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sampai dengan tahun 2019, rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun

secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara nominal ADH berlaku sebesar 24,34 juta rupiah pada tahun 2017, terus meningkat mencapai 29,20 juta rupiah pada tahun 2021. Sedangkan secara ADH konstan rata-rata konsumsi per kapita meningkat pada periode 2017-2019, dari 17,42 juta rupiah di tahun 2017 meningkat menjadi 18,67 juta rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 18,56 juta rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 18,57 juta rupiah, meskipun belum kembali pada nilai di tahun 2019.

Laju pertumbuhan konsumsi per kapita sejalan dengan laju pertumbuhan konsumsi per rumah tangga, yaitu pada kisaran 3 persen selama periode 2017-2019. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,63 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 3,41 persen, melambat dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan konsumsi per kapita pada tahun 2020 menurun sebesar -0,55 persen dan mulai meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,03 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADH Konstan 2010 pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,61 persen. Pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi yaitu meningkat sebesar 5,03 persen, dan melambat menjadi 4,75 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,89 persen. Konsumsi rumah tangga tahun 2021 mulai mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,33 persen.

Pada tahun 2020, daya beli masyarakat menurun signifikan, bahkan bisa dikatakan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas. Rumah tangga yang tidak mengalami penurunan pendapatan pun melakukan pilihan konsumsi yang lebih sederhana. Pada tahun 2021 daya beli masyarakat mulai pulih meskipun belum mencapai posisi seperti saat sebelum pandemi.

Tabel 7.
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021¹ (Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	41,75	42,56	43,30	44,84	45,30
Pakaian dan Alas Kaki	3,90	3,93	3,95	3,79	3,74
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,42	10,95	10,55	10,68	10,35
Kesehatan dan Pendidikan	5,55	5,49	5,59	5,91	5,99
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	25,98	25,73	25,39	23,54	23,47
Hotel dan Restoran	6,02	6,06	5,99	5,87	5,83
Lainnya	5,38	5,28	5,22	5,37	5,32
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 7 menggambarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2021, struktur konsumsi akhir rumah tangga Jawa Barat didominasi oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Namun demikian peranannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 41,75 persen (2017); 42,56 persen (2018) ; 43,30 persen (2019) ; 44,84 persen (2020) serta pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 45,30 persen. Adapun sebaliknya proporsi nonmakanan terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar menjadi 58,25 persen (2017); pada tahun 2018 sebesar 57,44 persen; 56,70 persen pada

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

tahun 2019; 55,06 persen pada tahun 2020 serta pada tahun 2021 sebesar 54,7 persen. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran.

Peningkatan peranan konsumsi makanan, minuman dan tembakau selama lima tahun terakhir menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Jawa Barat, memiliki kecenderungan kembali kepada prioritas pemenuhan kebutuhan primer, terutama pada kondisi krisis akibat pandemi. Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, hal tersebut menyebabkan rumah tangga melakukan beberapa pilihan dalam melakukan konsumsi. Seiring dengan penurunan tingkat pendapatan maka pola konsumsi cenderung kembali kepada pemenuhan kebutuhan primer. Proporsi konsumsi di atas, menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan nonmakanan yang masih cukup kuat. Seiring dengan pengeluaran untuk kebutuhan nonmakanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Di masa pandemi pengeluaran yang meliputi biaya untuk barang dan jasa kesehatan menjadi sangat penting. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama di awal masa pandemi mengalami *panic buying*, kondisi yang tidak dapat diprediksi menyebabkan masyarakat melakukan belanja besar-besaran terhadap kebutuhan barang kesehatan seperti masker, vitamin, *hand sanitizer* dan sembako. Sedangkan kebutuhan terkait biaya pendidikan dan kebutuhan energi rumah tangga cenderung tetap. Permintaan yang cukup tinggi juga terjadi pada konsumsi informasi dan komunikasi, sebagai akibat kebijakan *work from home* dan

school form home. Pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa transportasi, perjalanan wisata mengalami penurunan yang tajam.

Tabel 8.
Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	6,13	6,33	6,48	0,74	2,14
Pakaian dan Alas Kaki	3,25	4,84	3,73	-7,92	0,55
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,97	2,64	2,07	-0,85	-0,79
Kesehatan dan Pendidikan	3,97	4,10	4,23	1,94	4,62
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,35	4,95	4,16	-8,44	0,80
Hotel dan Restoran	5,16	4,57	5,06	-4,83	0,71
Lainnya	3,15	3,74	2,90	-2,34	0,01

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2017-2021 pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok cenderung meningkat yaitu 6,13 persen (2017); meningkat 6,33 persen (2018) dan meningkat 6,48 persen (2019), bahkan pada tahun 2020 pun masih mampu meningkat walaupun melambat yaitu 0,74 persen dan pada tahun 2021 meningkat 2,14 persen. Upaya pemerintah untuk menahan dampak krisis cukup mampu mempertahankan konsumsi rumah tangga sehingga tidak terkonstraksi lebih dalam. Kebersamaan sosial antar rumah tangga dalam masyarakat juga oleh lembaga-lembaga sosial lainnya

bergotong royong dalam menyelamatkan sesama merupakan faktor lain yang berperan dalam meredam dampak pandemi bagi rumah tangga.

Pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki selama periode 2017-2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhannya sebesar 3,25 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 4,84 persen, namun melambat di tahun 2019 menjadi 3,73 persen. Pada tahun 2020 kelompok komoditi ini mengalami penurunan laju yang cukup tajam, yaitu mencapai -7,92 persen, selanjutnya pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 0,55 persen. Kebutuhan pakaian dan alas kaki merupakan kebutuhan yang sedikit dikesampingkan oleh rumah tangga pada kondisi krisis.

Pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya tumbuh stabil, sampai dengan tahun 2019, akan tetapi mengalami penurunan paling dalam pada tahun 2020 mencapai -8,44 persen. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksin, kelompok pengeluaran ini mengalami pertumbuhan 0,8 persen. Hanya konsumsi komunikasi yang mengalami peningkatan baik di tahun 2020 maupun 2021. Demikian halnya dengan komoditi hotel dan restoran mengalami penurunan tajam mencapai -4,83 persen, kelompok tersebut terkait dengan kelompok komoditi transportasi, rekreasi dan budaya. Seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan kondisi pandemi yang semakin membaik pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok konsumsi yang bersifat "*leisure*".

Sebagaimana pola pertumbuhan kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok kesehatan dan pendidikan terus mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 1,94 persen dibanding

tahun sebelumnya yang sebesar 4,23 persen. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu.

Tabel 9.
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir
Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2017-2021² (Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	3,38	4,81	3,74	2,13	2,19
Pakaian dan Alas Kaki	3,02	5,07	5,22	3,54	1,22
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,57	2,20	2,42	1,44	0,98
Kesehatan dan Pendidikan	2,99	3,85	6,22	2,96	0,14
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,33	3,15	2,84	0,61	2,21
Hotel dan Restoran	3,75	5,10	2,15	2,33	1,85
Lainnya	4,67	3,39	4,43	4,65	2,25

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan tersebut mencakup perubahan harga pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 3,38 persen (2017); 4,81 persen (2018); serta 3,74 persen (2019); sebesar 2,13 persen (2020) dan pada tahun 2021 sebesar 2,19 persen. Di

² Tingkat perubahan harga produk konsumsi

tahun 2018 perubahan harga bahan makanan kembali meningkat seperti beras, daging ayam, telur, bawang serta cabe, namun pada tahun 2019 harga kembali terkendali dan pada tahun 2020 masih terjadi inflasi yang terkendali dan berlanjut pada tahun 2021. Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki cenderung stabil dan terkendali yaitu sebesar 3,02 persen (2017); 5,07 persen (2018); 5,22 persen (2019); dan 3,54 persen (2020); serta 1,22 persen pada tahun 2021. Harga produk pakaian dan alas kaki cenderung stabil, karena ketersediaan suplai tidak bersifat musiman, juga karena sifat komoditinya yang tahan lama. Hal yang lebih mempengaruhi harga komoditi ini adalah adanya peningkatan harga produksi karena kenaikan bahan baku atau bahan bakar.

Harga kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi peningkatan harga cukup signifikan. Hal ini seiring dengan peningkatan harga tarif dasar listrik dan harga bahan bakar. Pada tahun 2021 inflasi kelompok tersebut sangat rendah di bawah 1 persen hanya sebesar 0,98 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok Kesehatan dan Pendidikan pada tahun 2021 inflasi sebesar 0,14 persen. Sebelumnya inflasi kelompok komoditi kesehatan dan pendidikan pada tahun 2019 meningkat sampai sekitar 6,22 persen, di tahun-tahun lainnya hanya pada kisaran 2-3 persen. Peningkatan tersebut pada harga atau biaya jasa kesehatan dan jasa pendidikan.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Institusi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan lembaga nonpemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah *civil society*.

LNPRT berperan sebagai mitra pemerintah menyediakan jasa sosial kemasyarakatan, sehingga aktivitas ekonominya perlu dihitung. Selain itu, menurut SNA 2008 LNPRT sebagai salah satu pelaku ekonomi sehingga perlu disusun kerangka kerja sektor institusi LNPRT.

Peranan konsumsi akhir LNPRT di dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat minor apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	10.450,02	12.753,65	13.629,89	13.340,95	13.760,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.844,28	9.032,68	9.353,99	8.971,94	9.144,60
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,58	0,65	0,64	0,64	0,62

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Peranan konsumsi akhir LNPRT yang sangat minor terlihat pada proporsi konsumsi akhir LNPRT terhadap nilai PDRB yang selalu berada di bawah satu persen setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, peranan konsumsi akhir LNPRT tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,65 persen, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,58 persen. Di tahun 2019 dan 2020 peranan konsumsi akhir LNPRT sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 0,64

persen. Memasuki tahun 2021 peranan konsumsi akhir LNPRT kembali menunjukkan penurunan, yaitu menjadi sebesar 0,62 persen terhadap nilai perekonomian Jawa Barat.

Apabila dilihat besaran nilainya, dalam lima tahun terakhir konsumsi akhir LNPRT mengalami fluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai konsumsi akhir LNPRT salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas politik, di mana pengeluaran konsumsi partai politik pada tahun-tahun menjelang adanya Pemilu maupun Pilkada akan mendongkrak nilai konsumsi akhir LNPRT. Begitu pula dengan banyaknya berbagai kejadian bencana, hal itu dapat pula meningkatkan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT karena meningkatnya biaya layanan yang dikeluarkan.

Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2017 salah satunya dipengaruhi oleh persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018, baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota, yang sudah dimulai sejak akhir tahun 2017. Kegiatan persiapan berupa musyawarah-musyawarah daerah (Musda), pemilihan pasangan calon, kesepakatan antar partai pendukung dalam bentuk rapat dan pertemuan telah banyak dilakukan. Berbagai kegiatan LNPRT di tahun tersebut menyebabkan konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat tahun 2017 bernilai sekitar 10.450,02 miliar rupiah.

Pada tahun 2018, Jawa Barat menggelar 17 pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu 1 pemilihan gubernur, 6 pemilihan walikota, dan 10 pemilihan bupati. Tahun 2018 juga merupakan tahun persiapan untuk pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Hal itu menyebabkan kenaikan nilai konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2018 cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Kenaikan yang terjadi

mencapai 2.303,62 miliar rupiah, sehingga nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2018 menjadi sebesar 12.753,65 miliar rupiah. Pada momentum ini peranan konsumsi akhir LNPRT mengalami peningkatan menjadi 0,65 persen terhadap nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku.

Pesta demokrasi berupa pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah serta pemilihan Presiden Indonesia digelar serentak pada 17 April 2019. Kegiatan persiapan untuk Pilpres dan pemilihan anggota legislatif pusat daerah sudah dilakukan di tahun 2018. Meskipun sejak awal tahun 2019 kegiatan kampanye calon anggota legislatif maupun calon presiden makin gencar dilaksanakan, namun durasinya tidak sepanjang persiapan di tahun 2018. Hal itu menyebabkan peningkatan konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 tidak setinggi peningkatan yang terjadi pada tahun 2018. Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 mencapai 13.629,89 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 876,24 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan nilai konsumsi di tahun 2018. Peranan konsumsi akhir LNPRT pun sedikit terkoreksi pada tahun itu menjadi 0,64 persen terhadap nilai PDRB.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi hampir di seluruh negara pada tahun 2020 mempengaruhi perputaran roda perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Jawa Barat. Pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh hingga secara proporsional memberi pengaruh pula pada aktivitas LNPRT. Seperti halnya penerapan bekerja dan belajar dari rumah, kegiatan beribadah pun dilakukan dari rumah. Perayaan Hari Raya dan hari besar keagamaan di tempat-tempat ibadah dibatasi, bahkan ditiadakan, misalnya pada penyelenggaraan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan, Shalat Ied pada saat Iedul Fitri 1442 H, dan kegiatan kebaktian di gereja. Hal ini mengakibatkan kegiatan LNPRT yang bergerak

di bidang keagamaan menurun. Demikian pula dengan aktivitas LNPRT di bidang politik, pemilihan Kepala Serentak (Pilkada) yang semula direncanakan digelar pada 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Persiapan Pilkada dan kampanye pun lebih banyak dilakukan secara daring atau secara tatap muka dengan pertemuan terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Konsumsi akhir LNPRT di Jawa Barat sepanjang 2020 adalah sebesar 13.340,95 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 288,93 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2021, pandemi *Covid-19* belum berakhir dan masih sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi Jawa Barat. Sepanjang tahun 2021, nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 419,99 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau menjadi sebesar 13.760,94 miliar rupiah. Nilai tersebut telah melampaui nilai konsumsi akhir LNPRT sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19*. Peran institusi LNPRT yang cukup berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian selain pada saat adanya Pemilu atau Pilkada adalah pada saat terjadinya bencana alam. Pada kondisi ini, LNPRT yang banyak mengambil peran antara lain adalah lembaga bantuan kemanusiaan dan LSM. Pada setiap kejadian bencana alam, LNPRT berperan dalam pertolongan pertama dan penanggulangan baik korban maupun dampak lingkungan, sehingga pengeluarannya akan meningkat signifikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BNPB di dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia (<https://gis.bnpb.go.id>), kejadian bencana di Jawa Barat tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan dari sekitar 665 kejadian bencana di

2020 menjadi sebanyak 2.011 kejadian bencana di 2021. apabila dilihat berdasarkan jumlah korban jiwa dan kerusakan yang terjadi, kejadian bencana sepanjang 2021 di Jawa Barat mengakibatkan 73 orang meninggal dunia, sebanyak 6.866 rumah dan 383 fasilitas umum mengalami kerusakan. Selain itu, meskipun ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di tahun 2021, akan tetapi secara umum telah banyak pelanggaran kegiatan di tahun 2021, termasuk kegiatan keagamaan. Hal itu turut menjadi pendorong meningkatnya nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat di tahun 2021.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Peranan pemerintah di masa pandemi selama dua tahun terakhir cukup besar, terutama dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi. Melalui kebijakan tidak hanya di bidang kesehatan namun juga berbagai bidang terutama bidang pendidikan dan ekonomi. Di antaranya kebijakan Permenkeu No 23/PMK 03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, kebijakan Peraturan OJK RI No.11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019, kebijakan Inpres RI No. 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*). Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat di antaranya, keringanan biaya listrik, keringanan kredit, anggaran sebesar 405,1 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan di tengah wabah *Covid-19*. Anggaran bidang kesehatan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, alat-alat

kesehatan seperti *test kit*, *reagen*, *ventilator* dan lain-lain, juga diarahkan untuk anggaran bantuan dan perlindungan sosial.

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi di antaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai output untuk komoditi nonpasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai output pemerintah nonpasar, ada juga output pemerintah dengan harga pasar. Output pasar tersebut di antaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat serta bagaimana perkembangannya dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADH Berlaku maupun ADH Konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH berlaku sebesar 107,94 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2021 nilainya mencapai 123,7 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADH Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun, kecuali pada tahun 2020. Hal ini

mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 kembali meningkat.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami penurunan, pada tahun 2017 peranannya sebesar 6,04 persen dan kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 5,76 persen dan pada tahun 2019 peranannya sebesar 5,53 persen. Pada tahun 2020 peranan konsumsi pemerintah justru meningkat menjadi 5,69 persen tetapi pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 5,60 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 belanja pemerintah difokuskan pada anggaran kesehatan, bantuan dan perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi, dan di tahun 2021 saat kondisi membaik anggaran pemerintah mulai beralih kepada pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti di tahun 2020.

Pengeluaran konsumsi pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah di provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per kapita ADH berlaku di mana selama periode 2017-2021 terjadi peningkatan pada rata-rata konsumsi per kapita. Konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku pada tahun 2017 sebesar 2,2 juta rupiah, terus meningkat sampai dengan tahun 2021 mencapai 2,5 juta rupiah (lihat Tabel 11).

Tabel 11.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	107.939,50	112.935,06	117.448,94	118.688,96	123.705,13
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	68.619,75	69.973,15	72.248,44	71.902,49	73.303,61
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,04	5,76	5,53	5,69	5,60
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
ADHB	2.246,98	2.329,64	2.381,52	2.464,66	2.535,86
ADHK 2010	1.428,46	1.443,38	1.464,99	1.493,11	1.502,67
Konsumsi Pemerintah per pegawai (Ribu Rp)					
a. ADHB	258.414,55	282.741,26	298.307,28	308.395,96	341.911,06
b. ADHK 2010	164.280,39	175.177,83	183.503,01	186.828,14	202.605,30
Pertumbuhan (Persen) ³					
a. Total konsumsi pemerintah	3,82	2,40	2,82	-0,48	1,95
b. Konsumsi pemerintah per kapita	2,40	1,04	1,50	1,92	0,64
c. Konsumsi pemerintah per pegawai	6,57	6,63	4,75	1,81	8,44
Jumlah penduduk (000 orang)	48.037,60	48.683,70	49.316,71	48.156,23	48.782,40
Jumlah pegawai (orang) ⁴	417.699	401.129	393.718	384.859	361.805

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁴ Tidak termasuk polisi dan militer

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADH Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya selama periode tahun 2017-2021 (lihat Tabel 11). Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita meningkat 2,40 persen, kemudian meningkat cukup signifikan di tahun 2020 mencapai 1,92 persen, dan pada tahun 2021 mengalami perlambatan menjadi 0,64 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 258,41 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 2021 mencapai 341,91 juta rupiah (lihat Tabel 11). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 6,57 persen. Selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah pegawai pemerintah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 417.699 orang; menurun menjadi 361.805 orang di tahun 2021. Penurunan terus terjadi terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan PNS. Dalam kurun waktu tersebut, secara total terjadi penurunan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 55 894 orang atau turun sekitar 13 persen sejak tahun 2017.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" tersebut menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Tabel 12.
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah (ADHB)					
a. Konsumsi Kolektif (Miliar Rp)	68.340,94	70.646,35	72.707,77	70.854,14	68.531,29
(%)	63,31	62,29	61,91	59,70	55,40
b. Konsumsi Individu (Miliar Rp)	39.598,56	42.769,37	44.741,18	47.834,82	55.173,84
(%)	36,69	37,71	38,09	40,30	44,60
Total Konsumsi (Miliar Rp)	107.939,50	113.415,72	117.448,94	118.688,96	123.705,13
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan Riil (ADHK 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	18,80	0,90	2,34	(4,00)	(5,87)
b. Konsumsi Individu	(14,63)	4,99	3,60	5,25	13,55
Total Konsumsi	3,82	2,40	2,82	(0,48)	1,95
Pertumbuhan Indeks Harga Implisit (%)					
a. Konsumsi Kolektif	2,66	2,45	0,57	1,51	2,75
b. Konsumsi Individu	3,91	2,88	0,97	1,58	1,58
Total Konsumsi	3,27	2,61	0,72	1,54	2,23

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, secara rata-rata 60,52 persen dari total pengeluaran pemerintah. Peranan konsumsi kolektif pada tahun 2017 merupakan yang terbesar yaitu 63,31 persen. Berikutnya peranan konsumsi kolektif berangsur menurun sampai pada tahun 2021 sebesar 55,40 persen. Konsumsi kolektif adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pelayanan publik yang bersifat kolektif, atau yang bisa dinikmati

secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Akta Tanah, perijinan dan layanan administrasi lainnya. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 12)

Sedangkan konsumsi individu adalah konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani publik dengan target tertentu. Misalnya biaya pendidikan dasar hanya untuk penduduk di usia sekolah dasar, biaya kesehatan untuk melayani masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Dalam konsumsi ini termasuk juga biaya untuk perlindungan sosial. Konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 12), namun peranannya terhadap total konsumsi pemerintah mengalami kecenderungan meningkat pada periode 2017-2021.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Investasi merupakan komponen PDB/PDRB yang menghubungkan antara saat ini dan masa mendatang. Investasi memegang peranan penting tidak hanya dalam pertumbuhan siklus usaha jangka panjang tetapi juga dalam jangka pendek karena merupakan komponen yang paling tidak stabil dalam PDRB. Mankiw (2010) mengemukakan bahwa bagian terbesar dari pengeluaran investasi yaitu sejumlah tiga per empat dari total adalah investasi tetap bisnis. Adapun yang dimaksud bisnis adalah investasi barang yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi yang akan datang. Kata tetap artinya pengeluaran ini untuk kapital yang akan tinggal untuk sementara sebagai lawan dari investasi persediaan, yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Investasi tetap bisnis mencakup

semuanya, mulai dari perabot kantor hingga pabrik, komputer dan mobil perusahaan.

Perkembangan investasi fisik di wilayah Jawa Barat selama tahun 2021 tercermin dari beberapa indikator ekonomi yaitu informasi belanja modal berupa pembangunan infrastruktur dan belanja modal nonbangunan yang dilakukan oleh seluruh institusi pelaku ekonomi, rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah dan korporasi. Informasi pendukung untuk mengetahui nilai investasi dapat diperoleh dari data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta fenomena pembangunan di kawasan industri Jawa Barat.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan investasi fisik tertuang dalam kebijakan pembangunan wilayah berupa pencapaian visi dan misi. Visi yang diusung adalah "Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Untuk mendukung pencapaian visi ini maka dijabarkan ke dalam lima misi. Pembangunan infrastruktur memiliki relevansi dengan misi ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan serta tata ruang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu program kerja dan kegiatan yang relevan.

Sepanjang tahun 2021 meskipun pandemi *Covid-19* masih berlangsung dan terdapat pembatasan aktivitas perekonomian aktivitas pembangunan proyek infrastruktur tetap berjalan yaitu : 1) Pembangunan akses tol dari Jalan Tol Cipali ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; 2) Bogor Ring Road seksi 3A (2,9 km), Cibitung – Cilincing Seksi 1 (2,7 km); 3) Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 Ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 km; 4) Jalan Tol Cinere-

Jagorawi Seksi III sepanjang 14,64 kilometer berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat; 5) pembangunan jalur rel ganda Sukabumi-Bogor segmen Stasiun Paledang-Stasiun Cicurug; 6) Pembangunan jalan layang di Jalan Soekarno-Hatta; 7) Proyek pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan salah satu dari 16 proyek strategis nasional; 8) Pengalihan aliran sungai (river closure) Bendungan Leuwikeris di Desa Handapherang, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; 6) Pembangunan jaringan irigasi Rentang di Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat; 7) Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dioperatori oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC); 8) Dua proyek listrik tegangan tinggi kereta cepat Jakarta-Bandung. SUTT dan GIS dibangun sejak 2018 dengan memanfaatkan lahan gedung *existing* PLN ULTG Bekasi dan 9) Penyelesaian Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.

Investasi berupa pembangunan fisik yang dilakukan oleh institusi korporasi atau swasta di antaranya 1) Peletakan batu pertama pabrik baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar dolar US di Kabupaten Karawang, Jawa Barat; 2) Kedelapan tower di Meikarta yang tengah dibangun itu berada pada Distrik 2 di Kabupaten Bekasi dan 3) Investasi industri pengolahan susu PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi,

Perkembangan nilai investasi fisik Jawa Barat tahun 2021 berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US\$5,22 miliar meningkat sebesar 8,84 persen dibandingkan tahun 2020. Sementara pada tahun 2020 PMA terdampak pandemi *Covid-19* sehingga berkontraksi sebesar 18,49 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, perkembangan investasi dalam negeri tercermin dari data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu mencapai 59.948,53 miliar rupiah, sejalan dengan PMA maka

PMDN mengalami peningkatan kinerja cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 16,63 persen dari tahun 2020. Sementara pada tahun 2020 meskipun terdampak pandemi *Covid-19* PMDN masih mengalami peningkatan sebesar 4,29 persen.

Perkembangan aktivitas investasi fisik di Jawa Barat selama tiga tahun (2017-2019) menunjukkan peningkatan. Hal itu tercermin dari nilai PMTB ADH berlaku setiap periode mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2017 nilai PMTB sebesar 449.337,05 miliar rupiah, meningkat pada tahun 2018 sebesar 495.827,14 miliar rupiah kemudian pada tahun 2019 telah mencapai 531.364,62 miliar rupiah. Memasuki tahun 2020 aktivitas investasi fisik mengalami penurunan di antaranya karena pembatasan aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* tercatat nilai PMTB tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 489.180,23 miliar rupiah. Pada tahun 2021 aktivitas investasi fisik mengalami peningkatan tercermin dari nilai pada periode ini sebesar 547.931,94 miliar rupiah, nilai ini lebih besar dibandingkan sebelum Pandemi pada tahun 2019. Selama periode lima tahun (2017-2021) mengalami penambahan nilai sebesar 98.594,89 miliar rupiah.

Kinerja investasi fisik Jawa Barat yang tercermin dalam PMTB selama lima tahun terakhir (2017-2021) tidak terlepas dari dampak pandemi *Covid-19* pada kurun dua tahun terakhir (2020-2021). Jika ditelusuri dari tahun 2017 – 2019 kinerja PMTB masih menunjukkan kenaikan tercermin dari pertambahan nilai PMTB ADH konstan 2010 selama periode tersebut. Peningkatan nilai PMTB miliar rupiah ADH konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat selama empat tahun terakhir karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan

harga komponen PMTB. Posisi PMTB ADH konstan 2010 pada tahun 2017 masih sebesar 332.750,61 miliar rupiah kemudian pada tahun 2019 telah mencapai 366.760,22 miliar rupiah. Kinerja PMTB pada tahun 2020 turut terdampak pandemi *Covid-19* sehingga nilai riil mengalami penurunan yaitu sebesar 336.213,72 miliar rupiah. Kinerja PMTB kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 359.705,21 miliar rupiah. Tercatat rata-rata pertumbuhan komponen PMTB selama lima tahun (2017-2021) sebesar 8,10 persen

Tabel 13.

Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	449.337,05	495.827,14	531.364,62	489.180,23	547.931,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	332.750,61	352.312,42	366.760,22	336.213,72	359.705,21
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	25,13	25,29	25,03	23,47	24,80
Struktur PMTB [1]					
a. Bangunan (Miliar Rp)	338.490,53	379.900,23	415.877,92	392.849,74	439.594,40
(%)	75,33	76,62	78,27	80,31	80,23
b. Nonbangunan (Miliar Rp)	110.846,51	115.926,91	115.486,70	96.330,49	108.337,54
(%)	24,67	23,38	21,73	19,69	19,77
Total PMTB (Miliar Rp)	449.337,05	495.827,14	531.364,62	489.180,23	547.931,94
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2] (%)					
a. Bangunan	7,24	7,48	6,12	-5,96	6,47
b. Nonbangunan	3,27	0,66	-2,94	-17,33	9,22
Total PMTB	6,28	5,88	4,10	-8,33	6,99

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Komponen PMTB dalam perekonomian Jawa Barat memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Peranan komponen PMTB selama lima tahun terakhir (2017-2021) sebesar 24,80 persen terhadap total PDRB. Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Jawa Barat mengalami capaian terbesar di tahun 2018 yaitu sebesar 25,29 persen dan terendah di tahun 2020 sebesar 23,47 persen.

Komponen PMTB selama periode tiga tahun (2017-2019) memiliki kinerja positif sementara pandemi *Covid-19* berdampak terhadap kinerja PMTB tahun 2020, meskipun demikian rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir (2017-2021) masih memiliki kinerja positif yaitu sebesar 2,98 persen. Apabila kinerja PMTB dicermati selama lima tahun terakhir maka pada tahun 2017 memiliki pertumbuhan positif sebesar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018-2019 berangsur mengalami perlambatan menjadi masing-masing sebesar 5,88 persen dan 4,10 persen. Pada tahun 2020 aktivitas investasi regional Jawa Barat terdampak pandemi *Covid-19* sehingga kinerja PMTB berkontraksi 8,33 persen. Memasuki tahun 2021 komponen PMTB kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,99 persen, meskipun demikian nilai secara riil belum dapat melebihi nilai pada tahun 2019 (Tabel 13).

Komponen PMTB didisagregasi menjadi dua subkomponen dalam publikasi ini yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Jawa Barat. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB bangunan sebesar lebih dari tiga per empat bagian total PMTB, dengan rata-rata kontribusi selama 2017-2021 sebesar 78,15 persen. Peranan komponen PMTB bangunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 80,31 persen dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 75,33 persen. Kontribusi PMTB bangunan berangsur-angsur

mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2017-2021), hal ini sejalan dengan ekonomi sisi *supply* pada kategori konstruksi. Peranan kategori konstruksi selama 2017-2021 secara rata-rata adalah 8,42 persen, peranan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 8,67 persen kemudian peranan terendah pada tahun 2020 sebesar 8,21 persen.

Sementara itu komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian sebagai berikut : Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Peranan PMTB nonbangunan rata-rata selama 2017-2021 sebesar 21,85 persen. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 24,67 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 19,69 persen. Peranan komponen PMTB nonbangunan memiliki kecenderungan yang semakin mengecil selama kurun 2017-2020 dengan sendirinya akan berkebalikan dengan kontribusi PMTB bangunan kecuali pada tahun 2021 mengalami kenaikan kontribusi menjadi sebesar 19,77 persen.

Sementara itu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati perkembangan penambahan barang modal berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan dapat dicermati pada data Impor Barang Modal menurut penggolongan penggunaan barang atau *Broad Economics Category* (BEC). Kontribusi impor barang modal terhadap total impor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 10,94 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,65 persen. Angka ini sejalan dengan kontribusi PMTB nonbangunan pada perekonomian Jawa Barat pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan peranan dibandingkan periode sebelumnya.

Secara riil subkomponen PMTB bangunan selama 2017-2029 menunjukkan kinerja positif kecuali pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,27 persen. Tercatat pada tiga periode (2017-2019) pertumbuhan komponen ini mencapai angka lebih dari 6 (enam) persen, dengan kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 7,48 persen kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan melambat menjadi sebesar 6,12 persen. Aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 menurun dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di Jawa Barat pada Triwulan II tahun 2020 sehingga berdampak pada kinerja PMTB Bangunan yang berkontraksi sebesar 5,96 persen. Pada tahun 2021 meskipun masih terdapat pembatasan aktivitas ekonomi kinerja PMTB bangunan mengalami peningkatan sebesar 6,47 persen

Secara umum kinerja subkomponen PMTB nonbangunan pada periode 2017-2020 memiliki tendensi yang semakin menurun. Pada awal periode tahun 2017 subkomponen ini mencatatkan kinerja positif sebesar 3,27 persen dan periode berikutnya melambat sebesar 0,66 persen. Tidak dapat bertahan dengan kinerja positif, pada tahun 2019 kinerja PMTB nonbangunan mengalami kontraksi sebesar 2,94 persen. Kontraksi semakin dalam terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19* hal ini terindikasi dari kinerja PMTB nonbangunan yang berkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 17,33 persen. Belanja barang modal kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan kinerja positif sebesar 9,22 persen.

Peningkatan kinerja PMTB ini sejalan dengan kinerja tahunan impor luar negeri jenis barang modal kumulatif tahun 2021 yang meningkat sebesar 35,36 persen. Lebih lanjut, klasifikasi barang modal yang mengalami peningkatan signifikan adalah Alat Angkutan untuk Industri sebesar

2.070,76 persen.; Mobil Penumpang sebesar 441,21 persen dan Barang Modal Kecuali Alat Angkutan sebesar 12,49 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Deskripsi inventori pada unit institusi merupakan persediaan barang yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, belum selesai diproses, atau belum terjual. Sementara perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna penambahan atau pengurangan. Secara makro, inventori merupakan bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik. Informasi inventori menjelaskan mengenai porsi investasi yang telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi dalam berbagai aktivitas produksi. Sebagian investasi ini direalisasikan untuk keperluan bahan baku maupun bahan penolong.

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang nilainya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Perubahan inventori yang bertanda positif bermakna bahwa terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan jika bertanda negatif bermakna bahwa terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dalam perekonomian Jawa Barat dalam lima tahun terakhir cukup rendah, yakni selalu berada di bawah 4 persen setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021 nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dengan kata lain, terjadi penurunan

inventori di akhir tahun 2021 jika dibandingkan dengan awal tahun. Perkembangan nilai komponen perubahan inventori dan proporsinya dalam perekonomian Jawa Barat selama periode 2017-2021 ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	67 740,46	72 019,60	73 290,76	27 303,94	-15 096,31
b. ADHK (Miliar Rp)	42 629,35	43 588,21	43 599,93	16 198,45	-8 456,84
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ^[1]	3,79	3,67	3,45	1,31	-0,68

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

^[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Dalam kondisi normal (sebelum Pandemi *Covid-19*) secara nominal, perubahan inventori Jawa Barat memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 nilai nominal perubahan inventori Jawa Barat adalah sebesar 67.740,46 miliar rupiah atau sebesar 3,79 persen dari nilai PDRB Jawa Barat pada tahun tersebut. Pada periode 2018, perubahan inventori Jawa Barat meningkat menjadi sebesar 72.019,60 miliar rupiah. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni sekitar 4.279,14 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proporsi perubahan inventori di dalam perekonomian Jawa Barat justru mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi sebesar 3,67 persen. Begitu pula di tahun 2019, pada saat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan dari sebesar 5,65 persen di tahun 2018 menjadi 5,02 persen di tahun 2019, porsi perubahan inventori pun menurun menjadi sebesar 3,45

persen dari nominal PDRB Jawa Barat di tahun tersebut. Namun demikian, secara nominal, nilai perubahan inventori di tahun 2019 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai perubahan inventori tahun 2018.

Selanjutnya di tahun 2020, seperti telah diulas pada bagian-bagian sebelumnya, kinerja perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar 2,52 persen yang disebabkan oleh terjadinya pandemi *Covid-19*. Dalam kondisi tersebut, peranan perubahan inventori di dalam PDRB Jawa Barat pun terkoreksi cukup signifikan, yakni menjadi sekitar 1,31 persen. Di tahun tersebut, nilai komponen perubahan inventori mengalami penurunan sebesar 45.986,82 miliar rupiah, yang mengakibatkan nilai perubahan inventori Jawa Barat terkoreksi menjadi sebesar 27.303,94 miliar rupiah. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang menyebabkan arus barang ekspor dan impor luar negeri menjadi terhambat. Begitu pula dengan adanya pembatasan mobilitas manusia pun menyebabkan proses produksi barang dan jasa mengalami penurunan. Proses produksi lebih banyak memanfaatkan bahan baku yang sudah ada karena terhambatnya arus masuk barang impor dari luar negeri.

Pelonggaran aktivitas ekonomi yang diterapkan di tahun 2021 berdampak positif pada perbaikan perekonomian Jawa Barat. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,52 di tahun 2020, produksi barang dan jasa Jawa Barat kembali meningkat di 2021, tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang bernilai positif sebesar 3,74 persen. Peningkatan utilitas produksi memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, sedangkan barang jadi yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan di tahun 2020 sudah mulai terdistribusikan seiring dengan penerapan PPKM berlevel. Hal itu mengakibatkan inventori di akhir tahun 2021 menjadi lebih rendah dari pada kondisi di awal tahun, berimplikasi

pada nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir, yakni sebesar -15.096,31 miliar rupiah atau menurun sekitar 42.400,25 miliar rupiah jika dibandingkan nilai di tahun 2020.

Perubahan nilai nominal komponen perubahan inventori dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga. Sehingga untuk melihat kondisi perubahan inventori dalam nilai riilnya, dapat digunakan nilai atas dasar harga konstan. Dalam lima tahun terakhir nilai riil komponen perubahan inventori Jawa Barat memperlihatkan pola yang sama dengan nilai nominalnya. Nilai riil komponen perubahan inventori tahun 2017 adalah sebesar 42.629,35 miliar rupiah, meningkat menjadi 43.588,21 miliar rupiah di 2018, dan meningkat tipis menjadi 43.599,93 miliar rupiah di tahun 2019. Kontraksi ekonomi yang terjadi di 2020 mempengaruhi jumlah inventori, di mana barang jadi banyak yang tertahan di produsen maupun di pedagang karena adanya pembatasan pergerakan. Kegiatan ekspor yang terhambat, menyebabkan arus barang lebih banyak beredar di wilayah domestik dan antar provinsi, namun hal itu tidak maksimal karena pembatasan mobilitas dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai riil perubahan inventori Jawa Barat menurun drastis menjadi sebesar 16.198,45 miliar rupiah di tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, produsen berusaha menggenjot utilitas seiring dengan adanya kebijakan pelonggaran kegiatan pada sektor-sektor tertentu. Proses produksi lebih banyak mengandalkan bahan baku yang sudah ada karena aktivitas impor belum kembali sepenuhnya normal. Distribusi barang berjalan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, menyebabkan stok barang yang tertahan dapat dikurangi. Hal itu

berimplikasi pada nilai riil komponen perubahan inventori yang bertanda negatif, yakni sebesar -8.456,84 miliar rupiah.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengamati aktivitas inventori adalah dengan mengamati nilai impor bahan baku yang dilakukan oleh KPPBC lingkup Jawa Barat. Tercatat impor bahan baku yang dilakukan oleh Jawa Barat mencapai kontribusi sebesar 82,50 persen pada tahun 2021. Jenis impor bahan baku dominan adalah kelompok bahan baku untuk industri dengan kontribusi sekitar 51,71 persen dari keseluruhan nilai impor Jawa Barat di tahun 2021. Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mengamati perubahan inventori adalah melalui posisi persediaan stok beras di Perum Bulog. Berdasarkan data dari Perum Bulog Divre Jawa Barat, posisi stok beras di akhir tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 31,01 persen apabila dibandingkan dengan posisi stok beras di akhir 2020.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Komoditas yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor berasal dari output yang dihasilkan oleh aktivitas produksi suatu wilayah pada suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan konsumsi dan investasi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi oleh residen di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh nonresiden pihak di luar wilayah atau luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari nonresiden. Permintaan barang dan jasa terhadap produk

domestik dari nonresiden di mana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Pemulihan ekonomi global mulai terlihat pada tahun 2021 sebagai dampak Pandemi *Covid-19*, hal ini terlihat dari data transaksi perdagangan antar negara yang menunjukkan kinerja positif. Permintaan global terhadap komoditas yang berasal dari Jawa Barat khususnya kembali meningkat sehingga mendorong aktivitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa lebih besar. Permintaan terhadap barang dan jasa yang berasal dari Jawa Barat cukup signifikan terutama dari negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara lainnya.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan kontribusi ekspor luar negeri terbesar di tingkat nasional. Ekspor Indonesia terbesar menurut provinsi asal barang periode Januari – Desember 2021 adalah Jawa Barat dengan nilai US\$33,86 miliar (14,62 persen), diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar US\$24,32 miliar (10,50 persen), dan Jawa Timur sebesar US\$23,00 miliar (9,94 persen). Data ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Jawa Barat memiliki dampak signifikan di tingkat nasional, hal ini tidak terlepas dari peranan utama ekspor sebagai penghasil devisa negara. Selain itu ekspor berperan dalam perluasan pasar bagi produk domestik, peningkatan jumlah investasi dalam negeri, serta memperbaiki ekonomi negara karena dapat memperbesar cadangan devisa negara tersebut.

Gambaran aktivitas ekspor di Jawa Barat selama tiga periode (2017-2019) menunjukkan peningkatan nilai setiap periode secara nominal dan riil sehingga menjadi indikasi positif bagi perekonomian Jawa Barat. Komponen ekspor merupakan faktor penambah bagi perekonomian wilayah, devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan, selain itu dapat mendorong aktivitas

ekonomi produktif wilayah. Aktivitas ekspor tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja. Secara nominal atas dasar harga berlaku komponen Ekspor Barang dan Jasa pada lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami penambahan sebesar 388.151,88 miliar rupiah, nilai ekspor pada tahun 2017 masih pada posisi 732.231,39 miliar rupiah dan pada tahun 2021 telah mencapai 1.120.383,27 miliar rupiah. Sementara secara riil nilai pada tahun 2017 sebesar 493.916,58 miliar rupiah dan tahun 2021 telah mencapai 679.718,66 atau terjadi penambahan selama kurun waktu tersebut sebesar 185.802,09 miliar rupiah.

Peranan komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap total perekonomian Jawa Barat selama 2017-2021 secara rata-rata sebesar 44,77 persen. Selama empat periode (2017-2020) kontribusi komponen ini berangsur-angsur mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Komponen Ekspor Barang dan Jasa ini meskipun memiliki kontribusi yang besar dan berperan sebagai faktor penambah dalam perekonomian perlu dibandingkan dengan kontribusi komponen Impor Barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam perekonomian.

Tabel 15.

Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	732.231,39	859.971,31	943.711,91	915.058,23	1.120.383,27
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	493.916,58	550.805,25	591.685,34	552.911,91	679.718,66
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ^[1]	40,95	43,86	44,45	43,90	50,70
Pertumbuhan					
Total ekspor ^[2]	13,40	11,52	7,42	-6,55	22,93

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Selama tiga periode (2017—2019) kinerja Ekspor Barang dan Jasa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2021 seiring membaiknya ekonomi global terdampak Pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2017 komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 13,40 persen. Pada periode (2018-2019) pertumbuhan komponen ini berturut-turut mengalami perlambatan masing-masing sebesar 11,52 persen dan 7,42 persen. Perlambatan pertumbuhan di tahun 2019 merupakan imbas dari sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China di mana kedua negara ini merupakan mitra dagang Jawa Barat. Memasuki tahun 2020 kinerja Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi 6,55 persen seiring merebaknya Pandemi *Covid-19* sehingga berpengaruh terhadap permintaan ekspor global. Pemulihan ekonomi global memicu permintaan terhadap komoditas ekspor Jawa Barat sehingga terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 22,93 persen.

Berdasarkan kontribusi terhadap nilai ekspor total urutan negara tujuan ekspor Jawa Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut Amerika Serikat US\$6,59 miliar (19,59 persen); Jepang US\$3,23 miliar (9,59 persen); Tiongkok US\$2,36 miliar (7,01 persen); Thailand US\$2,02 (6,01 persen); dan Filipina US\$1,96 miliar (5,82 persen). Kelima negara tujuan ekspor ini berkontribusi hampir separuh dari total ekspor Jawa Barat atau sebesar 48,02 persen. Ekspor Jawa Barat dengan tujuan kelima negara tersebut mengalami kinerja positif.

Komoditas ekspor nonmigas utama Jawa Barat pada tahun 2020 berdasarkan peranannya terhadap ekspor total adalah sebagai berikut : 1) Mesin/Peralatan Elektrik (15,45 persen); 2) Kendaraan dan Bagiannya (13,60 persen); 3) Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (9,48 persen); 4) Barang-barang Rajutan (7,14 persen); 5) Alas Kaki (6,35 persen); 6) Karet dan Barang dari Karet (4,52 persen); 7) Pakaian Jadi Bukan Rajutan (3,68 persen); 8) Kertas/Karton (3,31 persen); 9) Serat Stafel Buatan (3,87 persen); dan 10) Plastik dan Barang dari Plastik (2,37 persen).

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Kebutuhan terhadap barang dan jasa seluruh entitas ekonomi di Jawa Barat tidak dapat seluruhnya dipenuhi dari output hasil produksi wilayah Jawa Barat. Keterbatasan sumberdaya merupakan salah satu alasan dilakukannya aktivitas permintaan barang dan jasa dari luar wilayah Jawa Barat yaitu luar provinsi dan luar negeri. Pemenuhan kebutuhan konsumsi antara untuk sektor bisnis dan konsumsi akhir serta investasi dapat dilakukan dengan impor barang dan jasa.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran. Pengukuran potensi dan besaran produk domestik dilakukan dengan mengeluarkan komponen Impor Barang dan Jasa dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan secara konsep sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari nonresiden. Tabel 16 di bawah ini menunjukkan perkembangan impor barang dan jasa Jawa Barat dalam lima tahun terakhir.

Selama tiga periode (2017-2019) komponen Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan secara nominal, penurunan terjadi di tahun 2020 terdampak Pandemi *Covid-19* dan kembali meningkat pada tahun 2021 seiring meningkatnya aktivitas produksi yang membutuhkan bahan baku, impor bahan baku memiliki kontribusi terbesar dalam impor Jawa Barat. Besaran impor total pada tahun 2017 pada posisi 748.948,45 miliar rupiah kemudian pada tahun 2021 mencapai 1.005.456,66 miliar rupiah dengan penambahan nilai selama kurun lima tahun sebesar 256.508,21 miliar rupiah. Sementara secara riil nilai komponen ini pada tahun 2017 sebesar 439.013 miliar rupiah dan pada tahun 2021 telah mencapai 511.643,47 miliar rupiah atau terjadi penambahan nilai sebesar 72.630,03 miliar rupiah.

Tabel 16.

Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	748.948,45	871.157,99	944.054,68	857.856,45	1.005.456,66
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	439.013,45	485.078,85	513.431,14	426.932,53	511.643,47
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	41,88	44,43	44,46	41,15	45,50
Pertumbuhan					
Total impor	12,22	10,49	5,84	-16,85	19,84

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Peranan Impor Barang dan Jasa pada tiga periode (2017-2019) terhadap perekonomian Jawa Barat memiliki tendensi yang meningkat, penurunan terjadi pada tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 kembali

mengalami peningkatan. Selama periode lima tahun terakhir (2017-2021) peranan terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 45,50 persen dan peranan terkecil pada tahun 2020 sebesar 41,15 persen. Komposisi impor mendekati 50 persen ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Barat memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas dari luar provinsi dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan karakteristik jenis impor Jawa Barat yaitu mayoritas merupakan impor bahan baku yaitu sebesar 82,50 persen pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020 impor bahan baku memiliki kontribusi sebesar 80,53 persen.

Kinerja komponen Impor Barang dan Jasa selama tiga periode (2017-2019) mengalami pertumbuhan positif dengan tren yang semakin menurun. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021. Pada awal periode yaitu tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif signifikan sebesar 12,22 persen, kemudian pada tahun 2018–2019 berturut-turut mengalami perlambatan masing-masing sebesar 10,49 persen dan 5,84 persen. Kontraksi cukup dalam terjadi di tahun 2020 sebesar 16,85 persen sebagai dampak melambatnya aktivitas produksi terdampak Pandemi *Covid-19*. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 sebesar 19,84 persen seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian. Apabila dicermati, kinerja Komponen Impor Barang dan Jasa setiap periode selama lima tahun (2017-2021) memiliki pola yang sama dengan kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Pertumbuhan impor yang tinggi di satu sisi bagi Jawa Barat dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di sisi *supply* karena mayoritas menggunakan bahan baku impor, tetapi di sisi lain menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap produk luar Jawa Barat. Kebijakan pemerintah untuk aktivitas impor harus diarahkan untuk mengurangi secara

bertahap ketergantungan bahan baku impor agar tidak menjadi pengurang bagi perekonomian wilayah.

Distribusi impor luar negeri menurut klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC) yaitu menunjukkan kategori akhir penggunaan barang. pada tahun 2021 yaitu (1) impor bahan baku sebesar 82,50 persen (2) impor barang modal sebesar 10,94 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 6,56 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor luar negeri Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sehingga ketika demand terhadap ekspor barang meningkat maka akan memicu peningkatan aktivitas impor untuk memenuhi bahan baku atau barang modal.

Komoditas andalan impor nonmigas Jawa Barat berdasarkan peranannya terhadap total impor luar negeri adalah 1) Mesin/Peralatan Elektrik (20,52 persen); 2) Mesin dan Peralatan Mekanis (10,60 persen); 3) Kain Rajutan (9,27 persen); 4) Plastik dan Barang dari Plastik (8,91 persen); 5) Kapas (4,74 persen); 6) Filamen Buatan (5,22 persen); 7) Perabot, Penerangan Rumah (1,97 persen); 8) Karet dan Barang dari Karet (2,43 persen); 9) Kendaraan dan bagiannya (1,27 persen) dan 10) Serat Stafel Buatan (2,12 persen). Kontribusi kesepuluh komoditas utama impor nonmigas Jawa Barat mencapai 67,05 persen dari total nilai impor nonmigas Jawa Barat.

Negara-negara importir utama Jawa Barat pada tahun 2021 dengan kontribusi terbesar berturut-turut adalah sebagai berikut: Tiongkok US\$3,62 miliar (33,34 persen); Korea Selatan US\$1,95 (17,98 persen); Jepang US\$1,32 miliar (12,15 persen); Vietnam US\$0,65 miliar (5,96 persen) dan Taiwan US\$0,55 miliarn (5,08 persen). Kelima negara asal impor ini berkontribusi hampir tiga perempat bagian dari total impor Jawa Barat atau sebesar 74,51

persen. Kinerja impor Jawa Barat yang berasal dari kelima negara memiliki pertumbuhan positif.

Neraca perdagangan Jawa Barat pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar US\$21,87 miliar lebih besar dibandingkan surplus pada tahun 2020 sebesar US\$17,90 miliar. Seiring dengan membaiknya perekonomian Jawa Barat khususnya, maka permintaan global terhadap komoditas ekspor Jawa Barat semakin tinggi sehingga dapat melebihi impornya.

Defisit neraca perdagangan Jawa Barat terbesar pada tahun 2021 terjadi dengan negara Tiongkok artinya ekspor Jawa Barat ke Tiongkok lebih kecil dibandingkan dengan impor Tiongkok ke Jawa Barat dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu sebesar US\$1,26 miliar lebih besar dibandingkan defisit tahun 2020 sebesar US\$0,44. Lebih lanjut, jika dicermati rasio ekspor terhadap impor pada tahun 2021 sebesar 0,65 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,82. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih mengalami ketergantungan cukup tinggi terhadap barang dan jasa dari Tiongkok, dalam hal ini perlu dipertimbangkan suatu kebijakan peningkatan daya saing dan insentif bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.



*BAB
IV*

*PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017-2021*

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2021

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tentunya berdampak pada perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Negara dengan tingkat penyebaran kasus *Covid-19* yang disebabkan oleh merebaknya varian Delta mencapai puncaknya di bulan Juli 2021. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bersama gugus tugas mengimplementasikan penguatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang diikuti oleh PPKM berdasarkan level yang diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain itu, mendukung pelaksanaan program vaksinasi *Covid-19* yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dengan target cakupan 208 juta penduduk Indonesia.

Usaha perbaikan perekonomian yang di tandai dengan mulai tumbuhnya perekonomian di Jawa Barat di triwulan II tahun 2021, yang pada akhirnya di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 3,74 persen. Perbaikan perekonomian ini telah mendorong perbaikan di seluruh komponen pengeluaran, baik pengeluaran rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah, PMTB dan ekspor-impor.

Pemulihan ekonomi ini tentunya berpengaruh terhadap Perubahan perubahan pola dan struktur yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai

ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. PDRB sisi pengeluaran mengukur nilai produk domestik dari sisi pengguna yaitu dalam menghasilkan produk barang dan jasa di suatu wilayah mampu menggambarkan siapa penggunan akhir dari produk tersebut yaitu rumah tangga, LNPRT, perusahaan dan pemerintah. Agregat dari PDRB pengeluaran ini merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Agregat tersebut merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas keseluruhan ekonomi.

Namun demikian, analisis perbandingan pengeluaran PDRB untuk permintan akhir baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, PMTB dan Ekspor, di dalamnya masih termasuk sebagian produk yang berasal dari impor.

4.1 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

Agregat PDRB pengeluaran menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, maka nilai tambah yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi

atas) faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDRB.

PDRB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi yang menjelaskan sejumlah pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai PDRB ini dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas yang menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. Namun, nilai agregat PDRB di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan pemerataan suatu wilayah yaitu dengan pendekatan nilai PDRB per kapita. *Series* data PDRB per kapita memberi gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Jawa Barat dalam menciptakan PDRB dari tahun ke tahun.

Tabel 17 memberi gambaran perkembangan PDRB baik berlaku dan konstan serta perkembangan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama lima tahun terakhir (2017-2021). Pemulihan ekonomi yang akibat dari pandemi *Covid-19* sudah dimulai di tahun 2021. Hal ini berdampak pada besaran nilai PDRB baik secara berlaku maupun konstan di tahun 2021 yang sudah mengalami perbaikan. Laju pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) tahun 2020 sebesar -2,44 persen menuju pertumbuhan positif pada 2021 menjadi 3,74 persen. Peningkatan pertumbuhan ini tentunya berakibat pada meningkatnya nilai PDRB per kapita, yang tercermin pada laju pertumbuhan PDRB per kapita yang sebesar 2,41 persen yang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,77persen.

Tabel 17.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	1.788.117,36	1.960.627,65	2.123.153,71	2.084.620,25	2.209.822,38
- ADHK 2010	1.343.662,14	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
- ADHB	37.223,29	40.272,77	43.309,19	43.288,70	45.299,58
- ADHK 2010	27.971,05	29.160,15	30.413,37	30.180,54	30.907,59
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	3,89	4,25	4,30	-0,77	2,41
Jumlah penduduk (000 org)	48 037,6	48 683,70	49.023,16	48.156,23	48.782,40
Pertumbuhan Penduduk	1,39	1,34	1,30	-1,77	1,30

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat di tahun 2017 mencapai 37,22 juta rupiah dan di tahun 2021 mencapai 45,30 juta rupiah. Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,01 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita ini sebagai dampak dari perbaikan ekonomi di tahun 2021 di mana nilai ini pada tahun sebelumnya mengalami penurunan. Perkembangan PDRB per kapita ini dapat diamati pada nilai laju pertumbuhan dari PDRB per kapita. Perkembangan selama lima tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar 3,89 persen, tahun 2018 pertumbuhan meningkat menjadi sebesar 4,25 persen, tahun 2019 masih tumbuh 4,30 persen, pada tahun 2020 turun sebesar 0,77 persen dan tahun 2021 meningkat hingga mencapai sebesar 2,41 persen.

Nilai PDRB per kapita ini selain dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tercipta juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk selama kurun lima tahun terakhir (2017-2021) memiliki kecenderungan yang semakin melambat. Tercatat pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,39 persen, kemudian pada akhir periode mencapai 1,30 persen. Pertumbuhan penduduk ini sempat mengalami penurunan yaitu di tahun 2020 yang mencapai 1,77 persen. Penurunan penduduk ini sebagai salah satu dampak dari pandemi *Covid-19* yang mana di tahun ini terjadi perubahan jumlah penduduk akibat dari perpindahan penduduk dari wilayah sentra pendidikan sebagai akibat dari perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran online maupun wilayah industri sebagai akibat dari pengurangan jumlah pekerja dan maupun akses dari penanganan pandemi *Covid-19* seperti "lockdown" dan PPKM.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator perbandingan pengeluaran PDRB untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap ekspor memberi gambaran melihat seberapa besar hasil produk wilayah tersebut digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dan digunakan untuk ekspor. Perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor lebih jauh memberikan informasi juga rasio antara konsumsi rumah tangga dengan ekspor.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari

pembelian dan perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri. Sedangkan ekspor adalah barang dan jasa hasil produk wilayah tersebut yang di gunakan oleh nonresiden wilayah tersebut.

Pemulihan ekonomi yang dimulai tahun 2021, menjadikan nilai kontribusi rumah tangga terhadap PDRB mengalami penurunan yaitu dari 66,15 persen menjadi 64,47 persen. Hal ini memberi gambaran bahwa pemulihan ekonomi mengalami perkembangan. Pada tahun 2020 yang merupakan masa pandemi *Covid-19* peran dominan konsumsi rumah tangga dalam PDRB Jawa Barat sebagai akibat dari turunnya peran komponen lainnya dalam perekonomian, sementara di tahun 2021 penurunan peran konsumsi rumah tangga menggambarkan telah adanya perbaikan konsumsi di komponen lainnya. Dengan demikian pemulihan ekonomi sebagai akibat dari meningkatnya peran produktif dari sektor produktif seperti investasi dan ekspor dalam perekonomian Jawa Barat.

Tabel 18.
Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.169.367,39	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	732.231,39	859.971,31	943.711,91	915.058,23	1.120.383,27
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,60	1,49	1,47	1,51	1,27

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 18 memberi gambaran bahwa terjadinya pemulihan ekonomi Jawa Barat setelah didera oleh pandemi *Covid-19*, yang ditandai oleh turunnya rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor yaitu dari 1,51 persen di tahun 2020 menjadi 1,27 persen di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan total ekspor Jawa Barat yang besar yang artinya terjadi geliat ekonomi dan mulai tumbuh dan berkembangnya usaha usaha yang berorientasi ekspor baik ekspor luar negeri maupun ekspor ke provinsi luar Jawa Barat. Periode tahun 2017-2019 perkembangan konsumsi akhir rumah tangga masih mengalami peningkatan, namun demikian di tahun 2021 mengalami penurunan hingga sebesar 8,86 miliar rupiah. Hal yang sama untuk total ekspor di mana periode 2017-2019 mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 28,65 miliar.

Jika mengamati dari rasio antara konsumsi rumah tangga dengan total ekspor dari tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang semakin menurun. Tercatat rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu nilai konsumsi rumah tangga sebesar 1,60 kali dari nilai total ekspor Jawa Barat, kemudian pada periode berikutnya berturut-turut mengalami penurunan yaitu 1,49 kali (2018), 1,47 kali (2019), pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan menjadi yaitu 1,51 kali dan di tahun 2021 turun kembali menjadi 1,27 kali. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 di mana pandemi *Covid-19* mulai melanda tanah air menyebabkan sebagian besar penyediaan (*supply*) yang tercipta diserap untuk memenuhi permintaan permintaan akhir yaitu konsumsi rumah tangga. Sementara untuk kegiatan ekspor yang mengalami penurunan merupakan akibat kegiatan ekspor barang dan jasa akibat dari lesunya perekonomian dunia dan terimbasnya produksi barang dan jasa. Hal yang berbeda dengan tahun 2021, dampak

pemulihan ekonomi yang sudah mulai dirasakan yaitu dengan meningkatnya aktivitas produksi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekspor barang dan jasa baik ekspor keluar negeri maupun ekspor ke antar wilayah provinsi.

Tren rasio yang semakin menurun merupakan indikasi positif bagi perkembangan ekspor Jawa Barat yaitu perkembangan konsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga lebih rendah dibandingkan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan ekspornya.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB merupakan rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan investasi fisik (pembentukan modal tetap). Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan investasi fisik. Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca ditambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Pada Tabel 19, menggambarkan rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB. Terlihat bahwa pada tahun 2021 rasionya mencapai 2,60 artinya PDRB yang dihasilkan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga di tahun 2021 sebanyak 2,60 kali lipat nilai PMTB (invenstasi) yang dilakukan. Proses pemulihan di tahun 2021 terlihat pula di komponen PMTB yaitu dengan peningkatan nilai hingga mencapai 58,75 miliar rupiah. Peningkatan ini karena sudah mulai Bergeraknya proyek-

proyek investasi yang sempat tertunda baik di sisi pemerintah, swasta dan rumah tangga. Sementara dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga juga memberi gambaran kemampuan rumah tangga untuk melakukan investasi.

Tabel 19.
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	.169.367,39	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	449.337,05	495.827,14	531.364,62	489.180,23	547.931,94
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,60	2,58	2,61	2,82	2,60

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Selama periode 2017-2021, rasio antara konsumsi rumah tangga ada kecenderungan untuk mengalami penurunan terkecuali di tahun 2020, yaitu dari 2,60 (2017) kemudian 2,58 kali (2018) dan 2,61 kali (2019), sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 2,82 kali dan pada tahun 2021 turun kembali menjadi 2,60 kali. Harapannya, rasio ini semakin menurun yang berarti hasil produk di Jawa Barat banyak digunakan untuk kegiatan investasi dan menuju ke arah yang lebih produktif.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Secara definisi konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir yang berasal dari produk domestik dan impor, untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi

yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Aktivitas konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga karena pengeluaran dengan jenis ini digolongkan ke dalam PMTB. Nilai PDRB (ADHB) menunjukkan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode sedangkan perbandingan konsumsi akhir terhadap PDRB menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi pada suatu wilayah.

Tabel 20.
Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	1.169.367,39	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378.904,38	1.424.594,08
b. LNPRT	10.450,02	12.753,65	13.629,89	13.340,95	13.760,94
c. Pemerintah	107.939,50	112.935,06	117.448,94	118.688,96	123.705,13
Jumlah	1.287.756,91	1.403.967,60	1.518.841,10	1.510.934,30	1.562.060,15
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.788.117,36	1.960.627,65	2.123.153,71	2.084.620,25	2.209.822,38
Proporsi (persen)	72,02	71,61	71,54	72,48	70,69

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 20 menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan rata-rata proporsinya 71,67 persen. Nilai proporsi sebesar 71,67 memberi arti bahwa total penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai duapertiga dari PDRB yang tercipta yang

mana sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT.

Perkembangan proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dengan nilai terbesar di tahun 2020 sebesar 72,48 dan nilai terendah di 2017 yaitu 72,02. Nilai proporsi yang tinggi pada tahun 2020 memberikan gambaran bahwa pada tahun tersebut porsi penggunaan PDRB untuk aktifitas yang nonproduktif yaitu untuk konsumsi lebih besar dibandingkan dengan aktifitas yang produktif (PMTB dan Ekspor). Sementara untuk tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi dengan nilai proporsi paling rendah memberi gambaran bahwa di saat pemulihan ekonomi porsi penggunaan PDRB untuk aktifitas produktif lebih besar dari pada untuk aktifitas nonproduktif (konsumsi).

Meningkatnya porsi yang digunakan untuk aktifitas produksi memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat yang merupakan sentra industri dan penyumbang industri nasional. Di samping itu, Jawa Barat merupakan wilayah dengan nilai investasi PMA dan PMDN yang cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antar residen dengan nonresiden yang berada diluar wilayah tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri dalam arti ekspor barang dan jasa merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik.

Kegiatan Ekspor sangat berkaitan dengan kegiatan PMTB, di mana untuk menghasilkan produk ekspor pasti menggunakan kapital (PMTB) di

wilayah tersebut. Seluruh produk domestik yang dihasilkan menuntut tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor).

Perbandingan ekspor terhadap PMTB memberikan gambaran mengenai seberapa besar produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah digunakan untuk aktivitas ekspor dan investasi. Rasio ekspor lebih tinggi dari PMTB menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekspor daripada digunakan untuk investasi. Demikian pula sebaliknya, jika rasionya lebih kecil dari 1 (satu) maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah lebih banyak digunakan untuk investasi dibandingkan untuk ekspor.

Tabel 21 memberi gambaran bahwa selama lima tahun terakhir (2017-2021) rasio ekspor di atas nilai 1 artinya hasil produk PDRB yang digunakan untuk ekspor lebih besar daripada untuk kegiatan investasi fisik. Tren rasio ekspor terhadap PMTB menunjukkan peningkatan yaitu dari 1,63 pada tahun 2017, meningkat menjadi 1,73 (2018) serta 1,78 (2019), selanjutnya 1,87 (2020) dan di tahun 2021 meningkat menjadi 2,04.

Tabel 21.
Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	732.231,39	859.971,31	943.711,91	915.058,23	1.120.383,27
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	449.337,05	495.827,14	531.364,62	489.180,23	547.931,94
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,63	1,73	1,78	1,87	2,04

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Pandemi *Covid-19* yang terjadi mulai di tahun 2020 tidak menurunkan rasio ekspor terhadap PMTB, hal ini memberi gambaran bahwa penurunan aktivitas ekspor tidak setajam penurunan aktivitas di PMTB. Aktivitas ekspor Jawa Barat masih memberikan respon yang bagus, beberapa ekspor komoditi justru ada yang mengalami peningkatan yaitu ekspor barang yang berkaitan dengan kesehatan seperti produk masker dan produk hasil industri kimia. Adapun untuk penurunan aktifitas PMTB yang turun tajam di masa pandemi sangat berkaitan di samping berkaitan dengan impor barang modal juga penundaan beberapa proyek startegis dan melambatnya kegiatan untuk proyek dari program nasional seperti KCIC. Sementara itu, di tahun 2022 di mana pemulihan ekonomi mulai di lakukan memberikan respon yang cukup baik terhadap kinerja Ekspor dan PMTB.

Lonjakan kenaikan nilai ekspor menjadi dua kali lipat dari nilai PMTB sangat berkaitan erat dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kontribusi perekonomian terbesar pada kategori industri pengolahan. Pada masa pandemi *Covid-19* ini, di awal tahun 2020 telah membuat industri pengolahan merupakan sektor terbesar di Jawa Barat menjadi salah satu yang paling terimbas Pandemi *Covid-19*. Turunnya pertumbuhan sektor Industri pengolahan ini tentunya berdampak pada kinerja ekspor Jawa Barat. Langkah pemerintah agar kinerja industri pengolahan tidak semakin terpuruk adalah memberikan insentif pada pelaku industri dengan harapan kinerja ekspor masih berjalan baik dan pengurangan tenaga kerja dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara itu, sisi investasi di masa pandemi *Covid-19* ini mengalami penurunan yang cukup tajam, tertundanya beberapa proyek PMA maupun PMDN yang ditandai dengan turunnya nilai investasinya.

Langkah langkah pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan serangkaian program pemerintah dalam bentuk paket stimulus fiskal untuk mengurangi dampak *Covid-19* terhadap perekonomian. Pada tahun 2021, realisasi terbesar dalam program PEN terbesar untuk penanganan kesehatan. Di samping itu adanya kebijakan intensif usaha melalui intensi pajak yaitu PPh 21 (pajak yang ditanggung pemerintah, DTP), PPh UMKM DTP, Pembebasan PPh Impor, Penurunan Tarif PPh Badan, PPN DTP dan PPnBM Mobil. Selain itu, dukungan UMKM yang diberikan dalam bentuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga KUR. Semua kebijakan ini dengan harapan akan mendorong pemulihan ekonomi.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, rasio perbandingan ini menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah domestik lain baik luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat. Besar kecilnya ketergantungan ini ditunjukkan melalui rasio, apabila rasionya kecil berarti ketergantungan terhadap impor semakin tinggi, dan sebaliknya bila rasionya besar berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi.

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2017-2021 menunjukkan tendensi yang semakin menurun terkecuali di tahun 2020. Tahun 2017 rasio PDRB terhadap impor sebesar 2,39, turun menjadi 2,25 (2018), turun menjadi 2,25 (2019) dan naik 2,43 (2020), dan di tahun 2021 turun kembali menjadi 2,20. Semakin turunnya rasio PDRB terhadap impor memberi

gambaran semakin tingginya ketergantungan terhadap produk impor baik impor barang konsumsi dan impor barang modal. Penurunan rasio yang secara terus menerus ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan wilayah terhadap produk impor yang berdampak terhadap aktivitas produksi domestik. Pemerintah dalam hal ini perlu merumuskan kebijakan untuk memajukan industri pengolahan yang berfokus pada substitusi impor.

Tabel 22.
Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.788.117,36	1.960.627,65	2.123.153,71	2.084.620,25	2.209.822,38
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	748.948,45	871.157,99	944.054,68	857.856,45	1.005.456,66
Rasio PDRB terhadap Impor	2,39	2,25	2,25	2,43	2,20

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Di masa pandemi *Covid-19*, tahun 2020 rasio PDRB terhadap impor meningkat. Hal ini memberi gambaran bahwa ketergantungan produk impor menurun di tahun 2020. Namun demikian di tahun 2021 dengan adanya program pembebasan PPh impor mendorong peningkatan nilai impor. Hal ini bisa dilihat dari turunnya angka rasio PDRB terhadap nilai impor yaitu hingga 2,20 persen. Nilai peningkatan nilai impor barang dan jasa di tahun 2021 mencapai 147,6 miliar rupiah, sementara di tahun 2020 nilai impor turun sebesar 86,20 miliar rupiah.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Total penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam ekonomi yang berasal dari produksi domestik dan impor sehingga total penyediaan ini merupakan penjumlahan dari output dengan impor. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah pada produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23.
Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.788.117,36	1.960.627,65	2.123.153,71	2.084.620,25	2.209.822,38
Persentase (persen)	70,48	69,24	69,22	70,85	68,73
Total nilai					
Impor ADHB (Miliar Rp)	748.948,45	871.157,99	944.054,68	857.856,45	1.005.456,66
Persentase (persen)	29,52	30,76	30,78	29,15	31,27
Total					
Permintaan Akhir (Miliar Rp)	2.537.065,81	2.831.785,64	3.067.208,39	2.942.476,70	3.215.279,05
Persentase (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Pada Tabel 23 terlihat bahwa pada periode lima tahun terakhir (2017-2021), tendensi total permintaan akhir terus meningkat setiap tahunnya, dari 2.537.065,81 miliar rupiah pada tahun 2017, meningkat menjadi 2.831.785,64 miliar rupiah (2018), meningkat menjadi 3.067.208,39

miliar rupiah (2019) dan menurun menjadi 2.942.476,70 miliar rupiah (2020) dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.215.279,05 miliar rupiah. Peningkatan permintaan akhir di tahun 2021 ini sejalan dengan pemulihan ekonomi Jawa Barat di mana konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofitt dan konsumsi pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan *series* data yang ada, dapat ditunjukkan bahwa selama ini ekonomi provinsi Jawa Barat masih selalu ditopang oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan ini dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*) yang selalu menunjukkan ketidakseimbangan tersebut.

Untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian barang dan jasa harus didatangkan dari luar provinsi Jawa Barat baik dari luar negeri maupun dari luar provinsi Jawa Barat yaitu antara 29 sampai dengan 31 persen dari seluruh total permintaan akhir. Tercatat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir pada tahun 2021 paling tinggi porsi pemenuhan barang dan jasa dari produk impor sebesar 31,27 persen dan paling rendah di tahun 2020 sebesar 29,15 persen. Sementara itu pemenuhan kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang berasal dari produk domestik memiliki tendensi yang terus menurun. Tercatat bahwa pemenuhan permintaan akhir yang berasal dari produk sendiri paling tinggi di tahun 2020 sebesar 70,85 persen dan paling rendah di tahun 2021 mencapai 68,73 persen. Dampak Pandemi *Covid-19* berdampak pada turunnya nilai impor barang jasa, selain adanya pembatasan berskala besar (PSBB) larangan impor barang. Namun demikian dengan adanya program pembebasan pajak impor di tahun 2021 menjadikan impor barang dan jasa meningkat.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat (nonresiden) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai Ekspor Neto. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2017-2019, posisi neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan antar provinsi selalu menunjukkan nilai negatif, artinya perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat dalam posisi defisit. Defisit tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 16.717,06 miliar rupiah, dan defisit terendah di tahun 2019 sebesar 342,76 miliar rupiah. Defisit ini terjadi akibatnya dari aliran dana yang keluar baik ke luar negeri dalam bentuk devisa maupun ke luar provinsi lebih banyak dari pada aliran dana yang ke Provinsi Jawa Barat, yang dalam

konteks lain disebut sebagai utang luar wilayah (luar negeri dan luar provinsi).

Tabel 24.
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

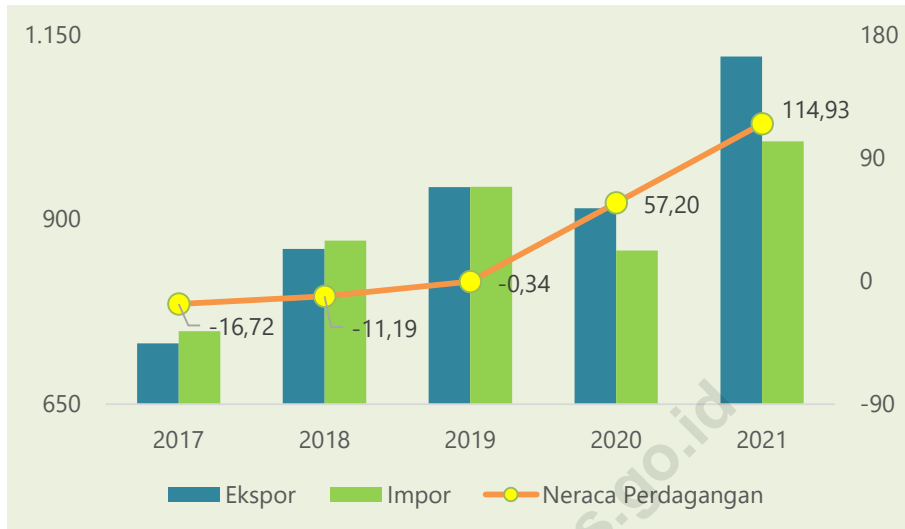
Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	732.231,39	859.971,31	943.711,91	915.058,23	1.120.383,27
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	748.948,45	871.157,99	944.054,68	857.856,45	1.005.456,66
Net Ekspor (X – M) (Miliar Rp)	-16.717,06	-11.186,68	-342,76	57.201,78	114.926,61
Rasio ekspor terhadap Impor	0,978	0,987	1,000	1,067	1,114

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Pada masa pandemi *Covid-19* yang dimulai tahun 2020, posisinya jadi berbalik yaitu menjadi surplus, artinya aliran devisa yang masuk lebih besar daripada aliran devisa yang keluar. Surplus perdagangan di tahun 2020 sebesar 57.201,78 miliar rupiah sementara di tahun 2021 meningkat dua kali lipat yaitu 114.926,61 miliar rupiah. Kondisi ini berarti selama pandemi ini terjadi aliran dana yang masuk ke Jawa Barat baik dari luar negeri dalam bentuk devisa maupun dari luar Provinsi Jawa Barat lebih besar dibandingkan dengan aliran keluar.

Mengamati nilai rasio ekspor terhadap impor di tahun 2017-2021, tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan yaitu dengan rata-rata rasio ekspor terhadap impor sebesar 1,021 yang berarti nilai ekspor lebih besar dari nilai impornya. Di tahun pandemi *Covid-19* rasio ekspor terhadap impor justru lebih besar dari nilai impornya atas satu yaitu dari tahun 2019 dengan nilai 1, tahun 2020 1,067 dan tahun 2021 sebesar 1,114.

Gambar 2. Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021



4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 sampai dengan 1 ($-1 < RPI < 1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25 menggambarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Pada periode tersebut, posisi ekspor luar negeri Jawa Barat selalu lebih tinggi daripada impor luar negeri dengan tren yang meningkat setiap tahunnya. Nilai ekspor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2017 tercatat sekitar 397.350,79 miliar rupiah, meningkat menjadi 439.537,88 miliar rupiah di tahun 2018. Mulai tahun 2019 nilai

ekspor luar negeri Jawa Barat mulai menurun menjadi 431.592,57 miliar rupiah di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 393.000,94 di tahun 2020. Namun demikian di masa pemulihan ekonomi Jawa Barat Pandemi Covid-19 nilai ekspor luar negeri mengalami peningkatan menjadi 485.575,47 miliar rupiah.

Tabel 25.
Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	397.350,79	439.537,88	431.592,57	393.000,94	485.575,47
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	198.226,25	223.561,22	192.372,30	150.916,64	193.945,02
(X - M) (Miliar Rp)	199.124,54	215.976,66	239.220,27	242.084,29	291.630,45
(X + M) (Miliar Rp)	595.577,04	663.099,11	623.964,88	543.917,58	679.520,49
R P I	0,33	0,33	0,38	0,45	0,43

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Sementara itu, kondisi yang sama dengan impor luar negeri Jawa Barat selama selang waktu 2017-2021. Nilai impor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2017 mencapai 198.226,25 miliar rupiah, meningkat menjadi 223.561,22 miliar rupiah di tahun 2018. Di tahun 2019 perkembangan impor menurun menjadi 192.372,30 miliar rupiah dan di masa Pandemi Covid-19 menurun kembali menjadi 150.916,64 di tahun 2020 dan di masa pemulihan ekonomi di tahun 2021 nilai impor luar negeri Jawa Barat kembali meningkat menjadi 193.945,02 miliar rupiah.

Dinamika nilai ekspor dan impor luar negeri tersebut menghasilkan suatu pola Rasio Perdagangan Internasional (RPI). Pada Tabel 25 terlihat bahwa RPI Jawa Barat pada periode 2017-2021 bernilai positif setiap

tahunnya dan mempunyai perkembangan yang selalu meningkat. Hal itu bermakna bahwa perdagangan internasional Jawa Barat selama kurun waktu tersebut didominasi oleh kegiatan ekspor.

Nilai ekspor luar negeri Jawa Barat selalu lebih tinggi dibandingkan nilai impor luar negerinya dengan nilai Rasio Perdagangan Internasional (RPI) di sekitar 0,3. Nilai RPI tertinggi dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,45, naik sekitar 0,06 poin dari nilai RPI tahun sebelumnya dan di masa pemulihan ekonomi sedikit turun yaitu 0,43. Nilai RPI yang selalu meningkat setiap tahun selama periode 2017-2021 menunjukkan bahwa kenaikan nilai impor masih berada di bawah kenaikan nilai ekspornya, dan sebaliknya penurunan impor selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penurunan nilai ekspor luar negeri.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL VALUE ADDED RATIO (ICVAR)

Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*value added*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICVAR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah produksi yang dihasilkan. Pendekatan ICVAR dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) pada dasarnya sama dalam mengukur besarnya investasi yang terjadi. Jika ada penambahan *value added* (NTB) menggunakan ICVAR namun jika penambahan berupa *output* maka menggunakan ICOR.

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Nilai Tambah dalam hal ini merupakan aktivitas produksi yang dilakukan oleh residen suatu wilayah pada satu

periode dalam penghitungan menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan.

ICVAR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap nilai tambah atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai tambah akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICVAR = \frac{\Delta K}{\Delta VA} = \frac{I}{\Delta VA} = \frac{I_t}{VA_t - VA_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

VA_t = PDRB ADHK tahun ke t

VA_{t-1} = PDRB ADHK tahun ke t-1

Tabel 26.
Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)
Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	1.343.662,14	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39
$\Delta(PDRB_t - PDRB_{t-1})$ (Miliar Rp)	68.042,90	75.962,00	71.335,55	-37.578,96	54.365,67
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	332.750,61	352.312,42	366.760,22	336.213,72	359.705,21
ICVAR	4,89	4,64	5,14	-8,95	6,62

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Nilai ICVAR pada dari tahun 2017-2019 selalu bernilai positif yaitu 4,89 di tahun 2017, turun menjadi 4,64 di tahun 2018, meningkat tinggi menjadi 5,14 di tahun 2019 dan bernilai negatif 8,95 di tahun 2020, dan di tahun 2021 kembali positif 6,62.

Pada masa sebelum pandemi *Covid-19*, nilai ICVAR ini di tahun 2019 dan tahun 2021 menunjukkan semakin tidak efektif karena dalam penciptaan investasi 1 unit membutuhkan 1 unit nilai tambah (*value added*). Sementara di tahun 2018 terjadi efisiensi investasi. Di tahun 2020 nilai ICVAR negatif disebabkan pada tahun 2020 telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya penambahan *value added* tidak hanya disebabkan oleh investasi. Dengan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi (penurunan *value added*), maka penambahan investasi ini menjadi tidak berarti karena tidak menggerakkan penambahan nilai tambah, sehingga penambahan investasi menjadi tidak efisien. Adapun di tahun 2021 yang merupakan masa pemulihan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, maka aktivitas investasi kembali berarti. Namun demikian, investasi yang ditanamkan masih belum efisien, hal ini digambarkan dengan semakin tingginya nilai ICVAR di tahun 2021.

Tendensi penurunan nilai ICVAR menunjukkan bahwa investasi makin efisien (Susilowati, dkk. 2012), dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya angka ICVAR menunjukkan bahwa investasi di Jawa Barat pada tahun tersebut makin tidak efisien apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diperlakukan sama pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang sifat investasinya cepat dalam menghasilkan nilai tambah akan berbeda dengan lapangan usaha yang sifat investasinya lambat dalam menghasilkan nilai tambah. Atau dengan kata lain, efisiensi investasi lapangan usaha yang berteknologi padat karya akan sangat berbeda dengan efisiensi investasi pada lapangan usaha yang padat kapital.

PDRB

MENURUT PENGELUARAN

PROVINSI JAWA BARAT



PDRB 2021
Atas Dasar Harga Berlaku
Rp. 2.209,82 Triliun

PDRB 2021
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Rp. 1.507,75 Triliun

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2021 : **3,74%** (y-o-y)

- ▲ **1,33%**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- ▲ **1,92%**
Pengeluaran Konsumsi LN/PRT
- ▲ **1,95%**
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
- ▲ **6,99%**
Pembentukan Modal Tetap Bruto
- ▲ **22,93%**
Ekspor Barang dan
- ▲ **19,84%**
Impor Barang dan Jasa



PDRB Provinsi Jawa Barat 2017-2021



The background features several large, stylized green leaves with a gradient from light to dark green, arranged in a fan-like pattern. A white circle is centered in the upper half of the page.

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan aktivitas perekonomian di tingkat regional (provinsi) pada suatu periode dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama yaitu SNNI 2010, dengan harapan hasil penghitungan PDRB akan konsisten dan memiliki keterbandingan secara wilayah.
2. PDRB menurut pengeluaran tahun 2017-2021 menggambarkan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
3. Publikasi ini menyajikan analisis mengenai perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

4. Data disajikan dalam bentuk series tahun 2017-2021, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
5. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain dan model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (*industry*), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
6. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan neraca perdagangan. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).
7. Penyajian Publikasi PDRB Pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 menggunakan data-data pendukung berupa literatur, data sekunder dari berbagai institusi terkait serta fenomena ekonomi dan sosial dalam lingkup regional, nasional dan global yang relevan dengan data dan informasi yang disajikan.
8. Penyajian Publikasi PDRB Pengeluaran khususnya pada tahun 2021 menitikberatkan pada pemulihan ekonomi akibat terdampak Pandemi *Covid-19*. Pemulihan ekonomi ini dapat terlihat dari kinerja ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 3,74

persen. Seluruh komponen pengeluaran dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian mengalami kinerja positif terutama PMTB dan ekspor yang mengalami pertumbuhan signifikan.

<https://jabar.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://jurnal.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	1.169.367.387,39	1.278.278.895,69	1.387.762.269,96	1.378.904.384,43	1.424.594.079,36
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	488.240.953,66	544.085.381,84	600.969.235,91	618.307.730,62	645.351.211,00
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	45.617.442,20	50.251.880,52	54.850.245,71	52.294.004,24	53.220.934,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	133.488.001,67	140.023.541,96	146.390.159,43	147.237.428,46	147.511.895,68
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	64.857.816,10	70.117.779,01	77.629.726,71	81.479.894,36	85.359.925,31
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	303.809.110,05	328.901.488,20	352.325.914,93	324.573.272,42	334.383.985,13
1.f. Hotel dan Restoran	70.447.142,63	77.423.937,73	83.089.604,68	80.914.006,46	82.993.599,86
1.g. Lainnya	62.906.921,08	67.474.886,41	72.507.382,59	74.098.047,87	75.772.527,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.450.023,97	12.753.645,64	13.629.886,57	13.340.952,35	13.760.940,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	107.939.500,30	112.935.058,42	117.448.944,50	118.688.958,93	123.705.129,94
3.a. Konsumsi Kolektif	68.340.936,16	70.165.686,00	72.707.769,05	70.854.142,18	68.531.287,90
3.b. Konsumsi Individu	39.598.564,14	42.769.372,42	44.741.175,45	47.834.816,75	55.173.842,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	449.337.046,79	495.827.138,48	531.364.616,36	489.180.230,19	547.931.938,37
4.a. Bangunan	338.490.533,97	379.900.232,22	415.877.915,49	392.849.743,34	439.594.397,21
4.b. NonBangunan	110.846.512,82	115.926.906,26	115.486.700,87	96.330.486,85	108.337.541,16
5. Perubahan Inventori	67.740.461,94	72.019.599,13	73.290.759,03	27.303.937,79	-15.096.313,96
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	397.350.791,98	439.537.882,91	431.592.571,69	393.000.937,56	485.575.472,02
6.a. Barang	390.733.247,00	432.396.949,44	423.577.374,84	387.029.921,68	481.317.448,03
6.b. Jasa	6.617.544,98	7.140.933,47	8.015.196,86	5.971.015,89	4.258.024,00
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	198.226.250,38	223.561.222,23	192.372.303,93	150.916.644,68	193.945.020,56
7.a. Barang	171.348.192,34	195.293.146,51	159.395.154,36	127.771.090,24	175.770.980,97
7.b. Jasa	26.878.058,04	28.268.075,72	32.977.149,57	23.145.554,44	18.174.039,59
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-215.841.600,63	-227.163.345,56	-239.563.032,71	-184.882.510,12	-176.703.841,71
8.a. Ekspor	334.880.599,23	420.433.422,69	512.119.340,95	522.057.296,17	634.807.801,56
8.b. Impor	550.722.199,86	647.596.768,25	751.682.373,67	706.939.806,30	811.511.643,27
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.788.117.361,36	1.960.627.652,47	2.123.153.711,47	2.084.620.246,45	2.209.822.383,52

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Juta Rupiah)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	836.915.018,75	878.991.272,43	920.742.896,72	894.114.734,32	905.974.620,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	305.318.200,17	324.630.215,76	345.656.746,37	348.199.607,77	355.651.319,90
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	39.179.686,04	41.077.471,84	42.610.328,80	39.235.874,10	39.451.531,77
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	99.079.363,66	101.695.565,34	103.802.779,70	102.924.782,75	102.116.003,58
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	52.553.053,32	54.709.038,31	57.021.920,61	58.130.996,09	60.816.954,18
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	236.409.683,35	248.119.912,31	258.439.360,21	236.636.286,94	238.521.074,46
1.f. Hotel dan Restoran	57.448.666,42	60.075.801,82	63.114.471,68	60.063.377,21	60.490.275,67
1.g. Lainnya	46.926.365,79	48.683.267,06	50.097.289,35	48.923.809,44	48.927.461,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	7.844.281,58	9.032.679,29	9.353.992,20	8.971.941,67	9.144.601,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	68.619.753,62	69.973.153,03	72.248.439,95	71.902.491,29	73.303.611,47
3.a. Konsumsi Kolektif	43.338.806,13	43.431.756,21	44.750.436,49	42.961.404,51	40.440.611,65
3.b. Konsumsi Individu	25.280.947,49	26.541.396,82	27.498.003,47	28.941.086,78	32.862.999,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	332.750.607,26	352.312.422,29	366.760.224,16	336.213.717,51	359.705.209,79
4.a. Bangunan	254.636.416,17	273.686.085,02	290.449.019,50	273.128.302,27	290.805.619,40
4.b. NonBangunan	78.114.191,09	78.626.337,27	76.311.204,66	63.085.415,24	68.899.590,39
5. Perubahan Inventori	42.629.349,90	43.588.210,21	43.599.928,48	16.198.450,45	-8.456.843,44
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	279.390.010,10	295.786.470,18	289.516.947,79	256.427.582,58	316.962.530,75
6.a. Barang	275.376.991,45	291.604.598,89	284.977.686,59	253.095.156,61	314.623.484,91
6.b. Jasa	4.013.018,65	4.181.871,29	4.539.261,20	3.332.425,96	2.339.045,85
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	150.133.434,37	152.607.775,42	132.534.278,73	108.008.200,21	137.374.835,33
7.a. Barang	134.687.424,97	137.077.712,04	115.082.832,98	95.601.944,43	127.595.821,38
7.b. Jasa	15.446.009,41	15.530.063,38	17.451.445,75	12.406.255,78	9.779.013,94
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-74.353.445,01	-77.452.291,97	-78.728.463,48	-22.439.994,77	-11.512.505,05
8.a. Ekspor	214.526.567,34	255.018.780,39	302.168.394,57	296.484.332,33	362.756.134,18
8.b. Impor	288.880.012,35	332.471.072,35	380.896.858,06	318.924.327,09	374.268.639,24
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.343.662.141,83	1.419.624.140,04	1.490.959.687,10	1.453.380.722,84	1.507.746.390,14

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	65,40	65,20	65,36	66,15	64,47
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,30	27,75	28,31	29,66	29,20
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,55	2,56	2,58	2,51	2,41
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,47	7,14	6,89	7,06	6,68
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,63	3,58	3,66	3,91	3,86
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	16,99	16,78	16,59	15,57	15,13
1.f. Hotel dan Restoran	3,94	3,95	3,91	3,88	3,76
1.g. Lainnya	3,52	3,44	3,42	3,55	3,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,58	0,65	0,64	0,64	0,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	6,04	5,76	5,53	5,69	5,60
3.a. Konsumsi Kolektif	3,82	3,58	3,42	3,40	3,10
3.b. Konsumsi Individu	2,21	2,18	2,11	2,29	2,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	25,13	25,29	25,03	23,47	24,80
4.a. Bangunan	18,93	19,38	19,59	18,85	19,89
4.b. NonBangunan	6,20	5,91	5,44	4,62	4,90
5. Perubahan Inventori	3,79	3,67	3,45	1,31	-0,68
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	22,22	22,42	20,33	18,85	21,97
6.a. Barang	21,85	22,05	19,95	18,57	21,78
6.b. Jasa	0,37	0,36	0,38	0,29	0,19
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	11,09	11,40	9,06	7,24	8,78
7.a. Barang	9,58	9,96	7,51	6,13	7,95
7.b. Jasa	1,50	1,44	1,55	1,11	0,82
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-12,07	-11,59	-11,28	-8,87	-8,00
8.a. Ekspor	18,73	21,44	24,12	25,04	28,73
8.b. Impor	30,80	33,03	35,40	33,91	36,72
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	62,29	61,92	61,76	61,52	60,09
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22,72	22,87	23,18	23,96	23,59
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,92	2,89	2,86	2,70	2,62
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,37	7,16	6,96	7,08	6,77
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,91	3,85	3,82	4,00	4,03
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	17,59	17,48	17,33	16,28	15,82
1.f. Hotel dan Restoran	4,28	4,23	4,23	4,13	4,01
1.g. Lainnya	3,49	3,43	3,36	3,37	3,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,58	0,64	0,63	0,62	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	5,11	4,93	4,85	4,95	4,86
3.a. Konsumsi Kolektif	3,23	3,06	3,00	2,96	2,68
3.b. Konsumsi Individu	1,88	1,87	1,84	1,99	2,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	24,76	24,82	24,60	23,13	23,86
4.a. Bangunan	18,95	19,28	19,48	18,79	19,29
4.b. NonBangunan	5,81	5,54	5,12	4,34	4,57
5. Perubahan Inventori	3,17	3,07	2,92	1,11	-0,56
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	20,79	20,84	19,42	17,64	21,02
6.a. Barang	20,49	20,54	19,11	17,41	20,87
6.b. Jasa	0,30	0,29	0,30	0,23	0,16
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	11,17	10,75	8,89	7,43	9,11
7.a. Barang	10,02	9,66	7,72	6,58	8,46
7.b. Jasa	1,15	1,09	1,17	0,85	0,65
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-5,53	-5,46	-5,28	-1,54	-0,76
8.a. Ekspor	15,97	17,96	20,27	20,40	24,06
8.b. Impor	21,50	23,42	25,55	21,94	24,82
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	8,73	9,31	8,56	-0,64	3,31
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9,72	11,44	10,45	2,89	4,37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,37	10,16	9,15	-4,66	1,77
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,62	4,90	4,55	0,58	0,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,07	8,11	10,71	4,96	4,76
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	8,87	8,26	7,12	-7,88	3,02
1.f. Hotel dan Restoran	9,11	9,90	7,32	-2,62	2,57
1.g. Lainnya	7,97	7,26	7,46	2,19	2,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	9,19	22,04	6,87	-2,12	3,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	7,22	4,63	4,00	1,06	4,23
3.a. Konsumsi Kolektif	21,96	2,67	3,62	-2,55	-3,28
3.b. Konsumsi Individu	-11,29	8,01	4,61	6,91	15,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	8,98	10,35	7,17	-7,94	12,01
4.a. Bangunan	10,02	12,23	9,47	-5,54	11,90
4.b. NonBangunan	5,93	4,58	-0,38	-16,59	12,46
5. Perubahan Inventori	0,06	6,32	1,77	-62,75	-155,29
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	14,26	10,62	-1,81	-8,94	23,56
6.a. Barang	14,32	10,66	-2,04	-8,63	24,36
6.b. Jasa	10,57	7,91	12,24	-25,50	-28,69
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	5,61	12,78	-13,95	-21,55	28,51
7.a. Barang	5,18	13,97	-18,38	-19,84	37,57
7.b. Jasa	8,44	5,17	16,66	-29,81	-21,48
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	25,05	5,25	5,46	-22,83	-4,42
8.a. Ekspor	28,39	25,55	21,81	1,94	21,60
8.b. Impor	27,06	17,59	16,07	-5,95	14,79
PDRB	8,16	9,65	8,29	-1,81	6,01

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	4,61	5,03	4,75	-2,89	1,33
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,13	6,33	6,48	0,74	2,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,25	4,84	3,73	-7,92	0,55
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,97	2,64	2,07	-0,85	-0,79
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,97	4,10	4,23	1,94	4,62
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,35	4,95	4,16	-8,44	0,80
1.f. Hotel dan Restoran	5,16	4,57	5,06	-4,83	0,71
1.g. Lainnya	3,15	3,74	2,90	-2,34	0,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,77	15,15	3,56	-4,08	1,92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	3,82	1,97	3,25	-0,48	1,95
3.a. Konsumsi Kolektif	18,80	0,21	3,04	-4,00	-5,87
3.b. Konsumsi Individu	-14,63	4,99	3,60	5,25	13,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	6,28	5,88	4,10	-8,33	6,99
4.a. Bangunan	7,24	7,48	6,12	-5,96	6,47
4.b. NonBangunan	3,27	0,66	-2,94	-17,33	9,22
5. Perubahan Inventori	-4,42	2,25	0,03	-62,85	-152,21
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	6,89	5,87	-2,12	-11,43	23,61
6.a. Barang	6,89	5,89	-2,27	-11,19	24,31
6.b. Jasa	7,02	4,21	8,55	-26,59	-29,81
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	-2,15	1,65	-13,15	-18,51	27,19
7.a. Barang	-2,86	1,77	-16,05	-16,93	33,47
7.b. Jasa	4,47	0,54	12,37	-28,91	-21,18
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	16,91	4,17	1,65	-71,50	-48,70
8.a. Ekspor	23,18	18,88	18,49	-1,88	22,35
8.b. Impor	21,50	15,09	14,57	-16,27	17,35
PDRB	5,33	5,65	5,02	-2,52	3,74

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	108,73	109,31	108,56	99,36	103,31
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	109,72	111,44	110,45	102,89	104,37
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	106,37	110,16	109,15	95,34	101,77
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	106,62	104,90	104,55	100,58	100,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	107,07	108,11	110,71	104,96	104,76
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	108,87	108,26	107,12	92,12	103,02
1.f. Hotel dan Restoran	109,11	109,90	107,32	97,38	102,57
1.g. Lainnya	107,97	107,26	107,46	102,19	102,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	109,19	122,04	106,87	97,88	103,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	107,22	104,63	104,00	101,06	104,23
3.a. Konsumsi Kolektif	121,96	102,67	103,62	97,45	96,72
3.b. Konsumsi Individu	88,71	108,01	104,61	106,91	115,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	108,98	110,35	107,17	92,06	112,01
4.a. Bangunan	110,02	112,23	109,47	94,46	111,90
4.b. NonBangunan	105,93	104,58	99,62	83,41	112,46
5. Perubahan Inventori	100,06	106,32	101,77	37,25	-55,29
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	114,26	110,62	98,19	91,06	123,56
6.a. Barang	114,32	110,66	97,96	91,37	124,36
6.b. Jasa	110,57	107,91	112,24	74,50	71,31
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	105,61	112,78	86,05	78,45	128,51
7.a. Barang	105,18	113,97	81,62	80,16	137,57
7.b. Jasa	108,44	105,17	116,66	70,19	78,52
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	125,05	105,25	105,46	77,17	95,58
8.a. Ekspor	128,39	125,55	121,81	101,94	121,60
8.b. Impor	127,06	117,59	116,07	94,05	114,79
PDRB	108,16	109,65	108,29	98,19	106,01

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	104,61	105,03	104,75	97,11	101,33
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	106,13	106,33	106,48	100,74	102,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	103,25	104,84	103,73	92,08	100,55
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	101,97	102,64	102,07	99,15	99,21
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	103,97	104,10	104,23	101,94	104,62
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	104,35	104,95	104,16	91,56	100,80
1.f. Hotel dan Restoran	105,16	104,57	105,06	95,17	100,71
1.g. Lainnya	103,15	103,74	102,90	97,66	100,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	104,77	115,15	103,56	95,92	101,92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	103,82	101,97	103,25	99,52	101,95
3.a. Konsumsi Kolektif	118,80	100,21	103,04	96,00	94,13
3.b. Konsumsi Individu	85,37	104,99	103,60	105,25	113,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	106,28	105,88	104,10	91,67	106,99
4.a. Bangunan	107,24	107,48	106,12	94,04	106,47
4.b. NonBangunan	103,27	100,66	97,06	82,67	109,22
5. Perubahan Inventori	95,58	102,25	100,03	37,15	-52,21
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	106,89	105,87	97,88	88,57	123,61
6.a. Barang	106,89	105,89	97,73	88,81	124,31
6.b. Jasa	107,02	104,21	108,55	73,41	70,19
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	97,85	101,65	86,85	81,49	127,19
7.a. Barang	97,14	101,77	83,95	83,07	133,47
7.b. Jasa	104,47	100,54	112,37	71,09	78,82
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	116,91	104,17	101,65	28,50	51,30
8.a. Ekspor	123,18	118,88	118,49	98,12	122,35
8.b. Impor	121,50	115,09	114,57	83,73	117,35
PDRB	105,33	105,65	105,02	97,48	103,74

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021**

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	139,72	145,43	150,72	154,22	157,24
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	159,91	167,60	173,86	177,57	181,46
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	116,43	122,33	128,73	133,28	134,90
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	134,73	137,69	141,03	143,05	144,46
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	123,41	128,16	136,14	140,17	140,36
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	128,51	132,56	136,33	137,16	140,19
1.f. Hotel dan Restoran	122,63	128,88	131,65	134,71	137,20
1.g. Lainnya	134,05	138,60	144,73	151,46	154,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	133,22	141,19	145,71	148,70	150,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	157,30	161,40	162,56	165,07	168,76
3.a. Konsumsi Kolektif	157,69	161,55	162,47	164,93	169,46
3.b. Konsumsi Individu	156,63	161,14	162,71	165,28	167,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	135,04	140,74	144,88	145,50	152,33
4.a. Bangunan	132,93	138,81	143,18	143,83	151,16
4.b. NonBangunan	141,90	147,44	151,34	152,70	157,24
5. Perubahan Inventori	158,91	165,23	168,10	168,56	178,51
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	142,22	148,60	149,07	153,26	153,20
6.a. Barang	141,89	148,28	148,64	152,92	152,98
6.b. Jasa	164,90	170,76	176,57	179,18	182,04
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	132,03	146,49	145,15	139,73	141,18
7.a. Barang	127,22	142,47	138,50	133,65	137,76
7.b. Jasa	174,01	182,02	188,97	186,56	185,85
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	290,29	293,29	304,29	823,90	1534,89
8.a. Ekspor	156,10	164,86	169,48	176,08	175,00
8.b. Impor	190,64	194,78	197,35	221,66	216,83
PDRB	133,08	138,11	142,40	143,43	146,56

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2017-2021 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	3,93	4,08	3,64	2,32	1,96
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,38	4,81	3,74	2,13	2,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,02	5,07	5,22	3,54	1,22
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,57	2,20	2,42	1,44	0,98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,99	3,85	6,22	2,96	0,14
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,33	3,15	2,84	0,61	2,21
1.f. Hotel dan Restoran	3,75	5,10	2,15	2,33	1,85
1.g. Lainnya	4,67	3,39	4,43	4,65	2,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,23	5,99	3,20	2,05	1,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	3,27	2,60	0,72	1,54	2,23
3.a. Konsumsi Kolektif	2,66	2,45	0,57	1,51	2,75
3.b. Konsumsi Individu	3,91	2,88	0,97	1,58	1,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	2,54	4,22	2,95	0,43	4,70
4.a. Bangunan	2,59	4,42	3,15	0,45	5,10
4.b. NonBangunan	2,57	3,90	2,64	0,90	2,97
5. Perubahan Inventori	4,68	3,98	1,74	0,27	5,90
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	6,89	4,49	0,32	2,81	-0,04
6.a. Barang	6,96	4,50	0,24	2,88	0,04
6.b. Jasa	3,32	3,55	3,41	1,47	1,60
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	7,94	10,95	-0,92	-3,74	1,04
7.a. Barang	8,28	11,99	-2,78	-3,51	3,07
7.b. Jasa	3,79	4,60	3,81	-1,27	-0,38
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	6,97	1,03	3,75	170,76	86,30
8.a. Ekspor	4,23	5,61	2,80	3,89	-0,62
8.b. Impor	4,58	2,17	1,32	12,32	-2,18
PDRB	2,68	3,78	3,11	0,72	2,18

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. PHH Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp. (022) 7272595; (022) 7201696; Faks.: (022) 7213572
E-Mail : bps3200@bps.go.id
Website : <http://jabar.bps.go.id>

ISSN 2655-0350



9 772655 035003